



Disperumkim  
Kota Bogor



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**2025**



[disperumkim.kotabogor.go.id](http://disperumkim.kotabogor.go.id)



## KATA PENGANTAR



Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Revisi Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor menyusun Laporan Kinerja dalam rangka mempertanggungjawabkan kinerja organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 2025.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) menggambarkan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor serta sebagai wujud komitmen pimpinan beserta segenap aparatur di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan kinerja ini menyajikan capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025 dan analisisnya. Walaupun masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan kinerja ini, kami berharap laporan ini dapat digunakan sebagai bahan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, serta optimalisasi peran dan peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor di tahun berikutnya sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintahan Kota Bogor pada umumnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman



**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Pada tahun 2025 Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor melaksanakan 5 (lima) program, 14 (empat belas) kegiatan dan 39 sub kegiatan. Pada awal tahun 2025, berdasarkan Dokumen Rencana Kerja terdapat 16 (enam belas) kegiatan dan 43 sub kegiatan. Dari rencana tersebut terdapat 2 (dua) kegiatan, 3 (tiga) sub kegiatan yang dirasionalisasi dan 1 (satu) sub kegiatan yang tidak tercapai yaitu “Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota” akibat lokasi relokasi tidak ditemukan. Alokasi anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025 sebesarRp. 206.198.545.343 dengan realisasi sebesarRp. 200.829.609.994. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan bahwa sebagian besar capaian dari 2 (dua) tujuan dan 5 (lima) sasaran relatif indikator kinerja berada di interval 75-100%.

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif yang didukung oleh bukti-bukti empiris sebagai bagian dari penyusunan LKIP. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan kesenjangan (*gap analysis*) antara target sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dengan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) IKU Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2025, secara umum menunjukkan bahwa realisasi kinerja pada kelima indikator telah memenuhi dan melampaui target yang ditetapkan (masuk dalam kategori capaian tinggi/sangat baik). Rincian pencapaian IKU berdasarkan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

**Form Capaian IKU Perangkat Daerah**

| No | Sasaran                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                      | Satuan   | Target | Realisasi | Capaian |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|---------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntable serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas | Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah             | Predikat | A      | A         | 100,00  |
|    |                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah | Indeks   | 3,85   | 3,85      | 100,00  |

| No | Sasaran                                                                                      | Indikator Kinerja                            | Satuan | Target | Realisasi | Capaian |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 2  | Terselenggaranya lingkungan asri dan perumahan dan kawasan permukiman                        | Persentase Perumahan Layak Huni (KUMIH)      | %      | 99,24  | 99,32     | 101,20  |
|    |                                                                                              | Persentase Perumahan Rumah layak Huni (MYLH) | %      | 96,12  | 96,38     | 100,27  |
| 3  | Terselenggaranya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas | Persentase Lahan RTH Publik Kawasan Budidaya | %      | 4,26   | 4,416     | 103,66  |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman, 2025

Untuk mendukung capaian-capaian yang telah ditetapkan, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor didukung dengan anggaran yang dapat dirinci sebagai berikut:

#### Data Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2023-2025

| Tahun | Pagu            | Realisasi       | %     |
|-------|-----------------|-----------------|-------|
| 2023  | 219.614.445.500 | 208.310.720.494 | 94,85 |
| 2024  | 201.138.483.133 | 196.881.037.983 | 97,88 |
| 2025  | 206.198.345.343 | 200.829.609.004 | 97,40 |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman, 2025

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

Kota Bogor

H. Chusnul Rowzi, M.M.  
 • Pembina Utama Muda  
 NP. 196211018094031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....2

IKHTISAR EKSEKUTIF .....3

DAFTAR ISI.....5

LAMPIRAN .....**Error! Bookmark not defined.**

BAB I PENDAHULUAN .....1

    A. Latar Belakang.....1

    B. Dasar Hukum .....2

    C. Maksud dan Tujuan.....3

    D. Gambaran Umum Organisasi.....4

    E. ISU STRATEGIS .....10

    F. SISTEMATIKA PENULISAN .....12

BAB II PERENCANAAN KINERJA.....13

    A. Rencana Strategis .....13

    B. Perjanjian dan Perjenjangan Kinerja Tahun 2025.....14

    C. Rencana Anggaran Tahun 2025 .....24

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....26

    A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman .....31

    B. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 .....61

    C. Raport Kinerja .....61

BAB IV PENUTUP .....66

LAMPIRAN .....67

    A. Perjanjian Kinerja 2025.....68

    B. HASIL APIP INSPEKTORAT .....100

    C. EVALUASI KINERJA TW IV TAHUN 2025.....104

    D. LRA 2025 .....105

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Rangkuman Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor .....7

Tabel 1. 2 Data Pegawai ASN berdasarkan Pendidikan Tahun 2025.....9

Tabel 1. 3 Data ASN Berdasarkan Golongan pada Tahun 2025.....9

Tabel 1. 4 Isu Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor 10

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026 ..... 14

Tabel 2. 2 Perjenjangan Kinerja Tahun 2025..... 15

Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 .....24

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....27

Tabel 3. 2 Realisasi IKU Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025 .....28

Tabel 3. 3 Capaian Janji Politik Perbaikan RTLH Tahun 2025.....31

Tabel 3. 4 Capaian Kegiatan Strategis Tahun 2025.....38

Tabel 3. 5 Capaian Program Prioritas Tahun 2025 .....39

Tabel 3. 6 Capaian Bidang Pengelolaan Taman dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2025 .....41

Tabel 3. 7 Capaian Pendapatan 2025.....60

Tabel 3. 8 Capaian IKU Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 .....60

Tabel 3. 9 Capaian Realisasi Anggaran Disperumkim Tahun 2025.....61

Tabel 3. 10 Raport Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025 .....61

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman di Tahun 2025.....62

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Alur Pikir Pengukuran kinerja .....2

Gambar 1. 3 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman  
Kota Bogor .....6

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 merupakan gambaran terselenggaranya “*Good Governance*” yang mencerminkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah telah berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Secara operasional, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 176 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. LKIP mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.

LKIP merupakan wujud implementasi kewajiban konstitusional dan manajerial berdasarkan **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014** tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKIP berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas atas realisasi tugas dan fungsi serta penggunaan alokasi anggaran yang telah diamanatkan. Fokus utama dalam penyusunan laporan ini terletak pada:

- **Pengukuran Kinerja:** Penilaian kuantitatif terhadap capaian sasaran.
- **Evaluasi Kinerja:** Analisis mendalam terhadap faktor keberhasilan dan hambatan.
- **Pengungkapan (*Disclosure*):** Penyajian hasil analisis pengukuran kinerja secara memadai dan transparan.

Laporan ini mengomunikasikan capaian sasaran strategis dan program/kegiatan melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU)** yang relevan dengan tugas pokok organisasi. Adapun pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2025 didanai oleh APBD Kota Bogor melalui alokasi yang ditetapkan. Kerangka logis serta keterkaitan antara kinerja perangkat daerah dengan pencapaian target kinerja makro Pemerintah Kota Bogor Tahun 2025 disajikan secara visual dalam alur pikir pada Gambar 1.1.



**Gambar 1. 1 Alur Pikir Pengukuran kinerja**

*Sumber: Hasil Analisis Disperumkim, 2026.*

Metodologi penyusunan LKIP ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja sasaran menitikberatkan pada capaian IKU serta hasil (*outcome*) dari program dan kegiatan strategis. Parameter keberhasilan ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025 yang telah disepakati, sebagai instrumen untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tupoksi dinas selama satu tahun anggaran.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Tahunan Dinas Perumahan dan Permukiman adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Penyusunan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bogor Tahun 2025 – 2026.
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 142 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026 yang memuat penetapan target dan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah.

## **C. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Laporan ini dimaksudkan sebagai dokumen evaluasi komprehensif dan instrumen pertanggungjawaban atas akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman dalam merealisasikan program dan kegiatan strategis sepanjang Tahun Anggaran 2025.

### **2. Tujuan**

- **Media Akuntabilitas:** Menyampaikan informasi kinerja yang transparan dan terukur kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) atas penggunaan wewenang dan sumber daya.
- **Sarana Evaluasi dan Perbaikan:** Menyediakan data dasar bagi

manajemen untuk melakukan analisis kesenjangan kinerja (*performance gap analysis*) guna perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) pada periode mendatang.

#### **D. Gambaran Umum Organisasi**

Bab ini memuat uraian mengenai gambaran pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. Penyajian gambaran pelayanan dimaksudkan untuk memberikan potret kondisi eksisting sumber daya, capaian kinerja, kelompok sasaran pelayanan, mitra dinas, kerjasama daerah, serta inovasi yang telah dan akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan. Kelembagaan Dinas Perumahan dan Permukiman diatur oleh:

- a. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 151);
- b. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2022 Nomor 119), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2025 Nomor 21)
- c. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 57 Tahun 2023) sebagaimana diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 57 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 2 Tahun 2025);

- d. Peraturan Wali Kota Bogor nomor 142 tahun 2022 tentang tugas, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 142 Tahun 2022) sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 142 tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor (Berita Daerah Nomor 4 Tahun 2025).

Secara Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perumahan dan Permukiman) Kota Bogor memiliki tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan permukiman; teknis di bidang perumahan
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perumahan dan permukiman;
- c. pelaksanaan teknis operasional di bidang perumahan dan permukiman;
- d. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, perlengkapan, sarana, dan prasarana Dinas;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan dan permukiman; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

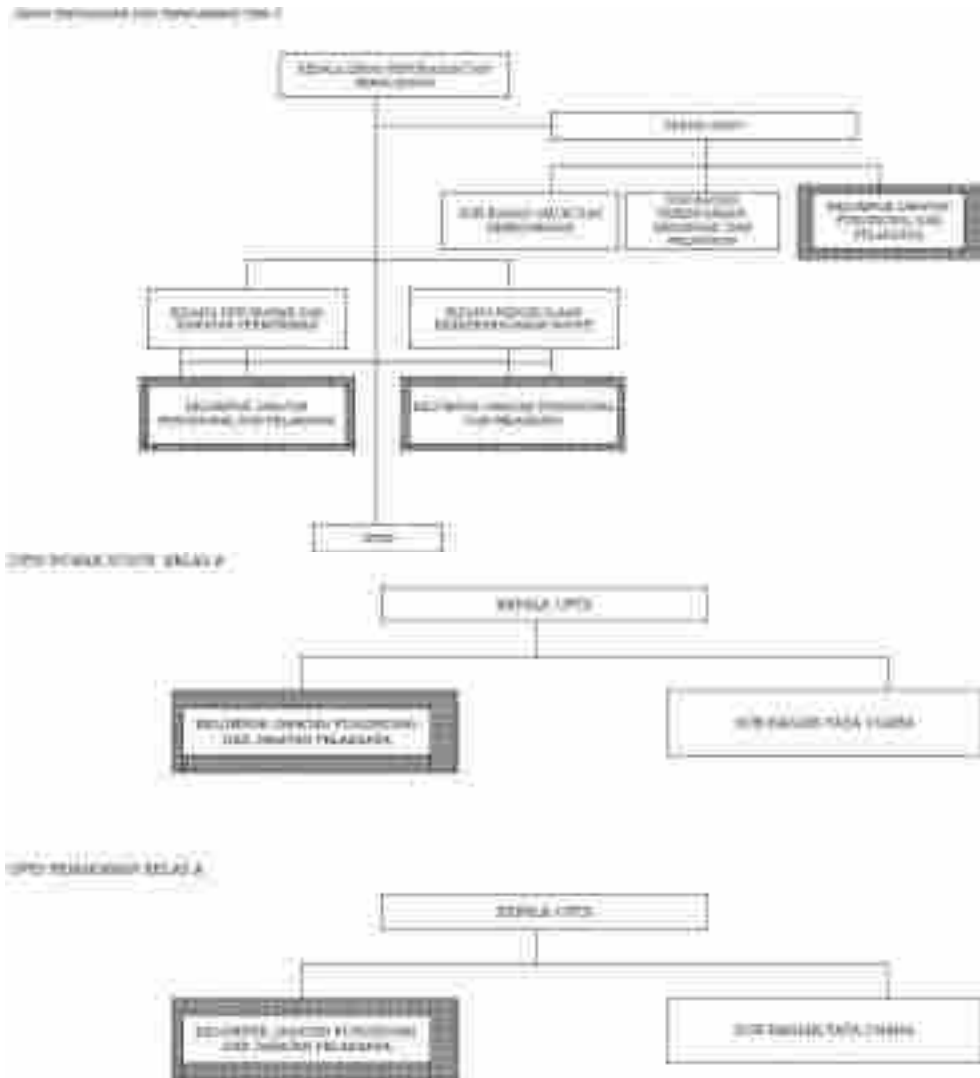
## **1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok**

Sesuai Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah, struktur organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub. Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- d. Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

- e. UPTD Pemakaman kelas A, terdiri dari:
  - Kepala UPTD
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
- f. UPTD Rumah Susun Kelas A, terdiri dari:
  - Kepala UPTD
  - Sub Bagian Tata Usaha
  - Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor ditampilkan pada Gambar 1.2.



**Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor**

Sumber : Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 142 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor,

gambaran pelayanan Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perumahan dan Permukiman) Kota Bogor memiliki Tugas dan Fungsi pada masing-masing bidang yang dapat dilihat di Tabel 1.1.

**Tabel 1. 1 Rangkuman Tugas dan Fungsi  
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor**

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kepala Dinas</b>                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fungsi Umum                                                                                                                                                                                           | memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, membina, monitoring, mengevaluasi, dan melaporkan penyelenggaraan fungsi urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan permukiman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sekretariat</b>                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan Sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fungsi Umum                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja di lingkup Dinas;</li> <li>2. Pelaksanaan tugas administrasi keuangan di lingkup Dinas;</li> <li>3. Pelaksanaan tugas administrasi Barang Milik Daerah, administrasi kepegawaian, administrasi umum, pengadaan Barang Milik Daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, dan pemeliharaan Barang Milik Daerah di lingkup Dinas; dan</li> <li>4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Dinas.</li> </ol>                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fungsi Umum                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan pembinaan administtrasi umum dan kepegawaian;</li> <li>2. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggan, dan perlengkapan di lingkungan Dinas;</li> <li>3. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan, keuangan, dan pelaporan. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fungsi Umum                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penyusunan dokumen perencanaan lingkup Dinas;</li> <li>2. pengkoordinasian dan penyusunan dokumen RKASKPD, dokumen Perubahan RKA-SKPD, DPA-SKPD, dan perubahan DPA-SKPD lingkup Dinas;</li> <li>3. pengoordinasian dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja lingkup Dinas;</li> <li>4. penyusunan rencana anggaran gaji dan tunjangan pegawai Dinas;</li> <li>5. pengelolaan administrasi keuangan dan pelayanan di bidang keuangan;</li> <li>6. penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas; dan</li> <li>7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan.</li> </ol> |
|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi dinas di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Kepala Bidang</b>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fungsi Umum                                                                                                                                                                                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>2. penyusunan rencana kerja di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>3. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>4. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> <li>5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;</li> </ol>                                                                                                                                                                  |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>UPTD Pemakaman Kelas A</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kategori                                            | Uraian Tugas & Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fungsi Umum                                         | 1. penyusunan rencana kerja UPTD Pemakaman;<br>2. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Pemakaman;<br>3. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana tempat pemakaman umum;<br>4. pelaksanaan pengelolaan tempat pemakaman umum milik Pemerintah Daerah; dan<br>5. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UPTD Rumah Susun Kelas A</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kategori                                            | Uraian Tugas & Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fungsi Umum                                         | 1. penyusunan rencana kerja UPTD Rumah Susun;<br>2. pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi umum di lingkungan UPTD Rumah Susun;<br>3. pelaksanaan koordinasi pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana dan prasarana rumah susun; dan<br>4. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subbagian Tata Usaha (UPTD Rumah Susun Kelas A)     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fungsi Umum                                         | 1. pengelolaan administrasi umum, administrasi keuangan, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;<br>2. pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan, dan perlengkapan; dan<br>3. pelaksanaan pelaporan Subbagian Tata Usaha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kategori                                            | Uraian Tugas & Fungsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fungsi Umum                                         | 1. perumusan konsep kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan dan Keanekaragaman Hayati;<br>2. penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;<br>3. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;<br>4. pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;<br>5. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;<br>6. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di Bidang Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan<br>7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang berkaitan dengan tugasnya. |

Sumber : Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 119 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

2. Data Kepegawaian

Dalam upaya memberikan gambaran yang komprehensif mengenai profil sumber daya manusia di lingkungan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, berikut disajikan data komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Data ini dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan formal terakhir dan tingkatan eselon jabatan untuk tahun evaluasi 2025.

Tabel 1. 2 Data Pegawai ASN berdasarkan Pendidikan Tahun 2025

| No     | Eselon                 | Pendidikan |     |      |             |     |    |      |     |      |             |     |    | Jumlah |
|--------|------------------------|------------|-----|------|-------------|-----|----|------|-----|------|-------------|-----|----|--------|
|        |                        | PNS        |     |      |             |     |    | PPPK |     |      |             |     |    |        |
|        |                        | SD         | SMP | SLTA | DIII/DII/ D | S 1 | S2 | SD   | SMP | SLTA | DIII/DII/ D | S 1 | S2 |        |
| 1      | Eselon II              |            |     |      |             |     | 1  |      |     |      |             |     |    | 1      |
| 2      | Eselon III             |            |     |      |             |     | 3  |      |     |      |             |     |    | 3      |
| 3      | Eselon IV              |            |     |      |             | 2   | 2  |      |     |      |             |     |    | 4      |
| 4      | Jabatan Fungsio<br>nal |            |     |      |             | 6   |    |      |     |      |             | 2   |    | 8      |
| 5      | Pelaksa<br>na          | 7          | 2   | 43   | 2           | 12  | 1  | 1    |     | 2    | 3           | 6   |    | 79     |
| JUMLAH |                        |            |     |      |             |     |    |      |     |      |             |     |    | 95     |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Januari 2026.

Berdasarkan analisis profil kepegawaian Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2025, instansi didukung oleh kekuatan SDM ASN sebanyak 95 personil. Struktur organisasi menunjukkan komposisi yang stabil dengan 85,3% PNS dan 14,7% PPPK. Poin kunci dari profil ini adalah terpenuhinya standar kualifikasi tinggi pada level manajerial, di mana seluruh pejabat Eselon II dan III telah berkualifikasi S2. Sementara itu, pada level operasional (Pelaksana), didominasi oleh lulusan SLTA (45 orang), yang menunjukkan besarnya tenaga kerja di lini depan administratif dan lapangan. Secara keseluruhan, profil pendidikan pegawai menunjukkan kombinasi antara kematangan manajerial dan potensi pengembangan teknis yang luas.

Selanjutnya, tabel di bawah ini merinci persebaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diklasifikasikan berdasarkan golongan serta latar belakang pendidikan formal pada tahun 2025.

Tabel 1. 3 Data ASN Berdasarkan Golongan pada Tahun 2025

| No     | Pendidikan  | GOLONGAN |    |     |    |      |     |   |   | JUMLAH |
|--------|-------------|----------|----|-----|----|------|-----|---|---|--------|
|        |             | PNS      |    |     |    | PPPK |     |   |   |        |
|        |             | I        | II | III | IV | IX   | VII | V | I |        |
| 1      | S2          |          |    | 4   | 3  |      |     |   |   | 7      |
| 2      | S1          |          |    | 19  | 1  | 8    |     |   |   | 28     |
| 3      | DIII/DII/DI |          | 1  | 1   |    |      | 3   |   |   | 5      |
| 4      | SLTA        |          | 15 | 28  |    |      |     | 2 |   | 45     |
| 5      | SD/SMP      | 1        | 8  |     |    |      |     |   | 1 | 10     |
| JUMLAH |             |          |    |     |    |      |     |   |   | 95     |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, Januari 2026.

Berdasarkan Tabel 1.3 diketahui bahwa struktur kepangkatan di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor cenderung berbentuk **piramida terbalik di tengah**, di mana konsentrasi pegawai menumpuk di Golongan III. Kondisi ini sangat menguntungkan secara operasional karena memiliki banyak tenaga pelaksana yang sudah berpengalaman (senior), namun memerlukan manajemen regenerasi yang baik agar tidak terjadi kekosongan saat masa pensiun tiba.

E. ISU STRATEGIS

Berdasarkan analisis yang terintegrasi dari Isu KLHS, Isu Global, Isu Nasional dan Isu Regional, berikut adalah rumusan Isu Strategis yang perlu ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor:

**Tabel 1. 4 Isu Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor**

| Ruang Lingkup Pelayanan PD                    | Isu KLHS yang Relevan dengan PD                                                                                                                      | Isu Lingkungan Dinamis                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                 | Isu Strategis                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                      | Global                                                                                                | Nasional                                                                                                      | Regional                                                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| 1                                             | 2                                                                                                                                                    | 3                                                                                                     | 4                                                                                                             | 5                                                                                                                               | 6                                                                                                                                                       |
| Unsur Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | <ul style="list-style-type: none"> <li>Akses infrastruktur dasar belum merata.</li> <li>Tingginya angka <i>backlog</i> kepemilikan rumah.</li> </ul> | <i>SDGs Goal 11</i> : Mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan. | Program 3 Juta Rumah (Penyediaan hunian terjangkau) dan Pengentasan Kawasan Kumuh Terintegrasi.               | Keterbatasan lahan di Kota Bogor menyebabkan tingginya harga hunian dan munculnya kantong kumuh baru.                           | Belum optimalnya penyediaan hunian layak huni yang terjangkau (mengatasi backlog) dan penanganan kualitas kawasan permukiman kumuh secara terintegrasi. |
|                                               | Banyak perumahan yang belum menyerahkan aset PSU ke Pemerintah Daerah.                                                                               | Standar kenyamanan dan keselamatan lingkungan hunian global (Livable City).                           | Penegakan regulasi terkait kewajiban pengembang dalam penyediaan dan penyerahan PSU (Permendagri No. 9/2009). | Belum updatenya data banyak perumahan yang belum dan sudah Serah Terima Aset (PSU) ke Pemkot Bogor.                             | Rendahnya serah terima Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) perumahan dari pengembang ke Pemkot Bogor.                                                 |
|                                               | Permukiman di sempadan sungai dan kawasan rawan longsor belum tertangani dengan optimal.                                                             | Climate Change: Peningkatan risiko bencana hidrometeorologi (banjir lintasan & longsor).              | Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan.                                                          | Topografi Kota Bogor yang berbukit dan curah hujan tinggi meningkatkan risiko longsor pada permukiman padat di bantaran sungai. | Tingginya kerentanan permukiman terhadap bencana hidrometeorologi serta belum optimalnya pengelolaan dan serah terima PSU perumahan dari pengembang.    |

| Ruang Lingkup Pelayanan PD        | Isu KLHS yang Relevan dengan PD                                                                                               | Isu Lingkungan Dinamis                                              |                                                                       |                                                                        | Isu Strategis                                                                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                                                                                                               | Global                                                              | Nasional                                                              | Regional                                                               |                                                                                                                                       |
| 1                                 | 2                                                                                                                             | 3                                                                   | 4                                                                     | 5                                                                      | 6                                                                                                                                     |
|                                   | Keterbatasan lahan dan prasarana, sarana, serta utilitas (PSU).                                                               | Urbanisasi dan Krisis Lahan Perkotaan.                              | Pembangunan 3 juta rumah per tahun.                                   | Pembangunan Rusunawa.                                                  | Keterbatasan akses MBR terhadap hunian layak yang terjangkau dan aman, serta minimnya lahan pemerintah untuk pembangunan rumah susun. |
|                                   | Penataan dan pengembangan TPU pemerintah.                                                                                     |                                                                     |                                                                       |                                                                        | Belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk RTH dan TPU dalam meningkatkan daya dukung lingkungan dan penyediaan pelayanan dasar.        |
| Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Alih fungsi lahan terbuka hijau menjadi kawasan perumahan dan permukiman menimbulkan krisis ruang terbuka hijau di perkotaan. | Degradasi Lingkungan dan penurunan daya dukung kota (urban sprawl). | Target RTH Publik 20% di kawasan perkotaan dan penataan lahan kritis. | Keterbatasan lahan perkotaan dalam memenuhi ruang terbuka hijau (RTH). | Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan krisis ketersediaan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU).   |

Sumber: Hasil analisis Dinas Perumahan dan Permukiman, 2026.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa Isu Strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor sebagai berikut:

1. Kesenjangan Kualitas Hunian dan Resiliensi Infrastruktur Permukiman:
- Isu Teknis: Belum optimalnya intervensi peningkatan kualitas perumahan, penataan kawasan permukiman, dan pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dalam rangka mitigasi *backlog* hunian dan reduksi luasan kawasan kumuh.

○ Akar Masalah Kualitatif: Keterbatasan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak dan terjangkau dan rendahnya efektivitas serah terima aset PSU dari pihak ketiga.

○ Dimensi Resiliensi: Peningkatan kerentanan kawasan permukiman terhadap risiko bencana hidrometeorologi (akibat perubahan iklim) yang belum diimbangi dengan strategi adaptasi dan rehabilitasi yang optimal.

## 2. Disparitas Pengendalian Tata Ruang dan Daya Dukung Lingkungan:

- Isu Teknis: Rendahnya efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan regulasi lingkungan hidup, yang diindikasikan oleh alih fungsi lahan fungsional dan terhambatnya pemenuhan standar Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Dampak Lingkungan: Keterbatasan optimalisasi dan pengembangan lahan untuk RTH dan TPU, yang berdampak krusial terhadap penurunan kualitas ekologis dan estetika lingkungan kota.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025, terdiri dari 4 (empat) Bab dan Lampiran sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKIP, penjelasan umum organisasi, isu strategis (*strategic issued*) dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini dijabarkan berbagai hal terkait rencana strategis, ringkasan/ikhtiar perjanjian kinerja tahun 2025 dan penetapan IKU.

### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini diuraikan terkait Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Pada bagian ini berisi realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### **BAB IV PENUTUP**

Pada bagian penutup, diuraikan sebuah simpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

### **LAMPIRAN**

Berisi Perjanjian Kinerja dan lain-lain yang dianggap perlu.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Rencana Strategis**

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 merupakan penjabaran detail dari Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029 maupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026. Dokumen ini disusun untuk mengukur tingkat capaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun berjalan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Bogor 2025-2029. Adapun Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor periode 2024-2028 adalah sebagai berikut: “BOGOR BERES – BOGOR MAJU” dengan Misi: Bogor Cerdas, Bogor Sehat, Bogor Sejahtera dan Bogor Lancar.

**Kerangka Cascading Kinerja**

Korelasi logis (*cascading*) antara Tujuan dan Sasaran Strategis Pemerintah Kota Bogor dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan dan Permukiman diilustrasikan dalam alur hubungan struktur kinerja berikut:



**Gambar 2. 1 Hierarki Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Tingkat Kota dan Pemerintah Daerah**

Sumber: Hasil Analisis Disperumkim, 2025.

Untuk mengukur efektivitas pencapaian sasaran strategis tersebut,

ditetapkan instrumen pengukuran melalui indikator yang tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Permukiman berdasarkan RPD Kota Bogor Tahun 2025-2026**

| No. | Aspek/Fokus/Bidang<br>Urusan/Indikator Kinerja<br>Pembangunan Daerah                                          | Satuan | Kondisi<br>Awal | Target<br>2025 | Target<br>2026 | Kondisi<br>Akhir |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------|----------------|------------------|
| 1   | Rasio rumah layak huni                                                                                        | Persen | 19.30           | 21.63          | 22.43          | 22.43            |
| 2   | Rasio pemukiman layak huni                                                                                    | Persen | 89.14           | 91.38          | 91.87          | 91.87            |
| 3   | Cakupan ketersediaan rumah layak huni                                                                         | Persen | 83.76           | 95.40          | 99.54          | 99.54            |
| 4   | Persentase lingkungan pemukiman kumuh kewenangan kota                                                         | Persen | 2.02            | 2.28           | 2.58           | 2.58             |
| 5   | Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan (kewenangan kota, provinsi, pusat)                     | Persen | 3.52            | 1.68           | 1.63           | 1.63             |
| 6   | Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan                                                                         | Persen | 0.987           | 0.71           | 0.69           | 0.69             |
| 7   | Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU                                               | Persen | 98.65           | 98.69          | 99.83          | 99.83            |
| 8   | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kabupaten / Kota                             | Persen | 97.37           | 98.04          | 98.83          | 98.83            |
| 9   | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program Pemerintah kabupaten / Kota | Persen | 100             | 100            | 100            | 100              |
| 10  | Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten / Kota yang ditangani                           | Persen | 72.36           | 62.18          | 59.47          | 59.47            |
| 11  | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak layak Huni)                                                        | Persen | 16.24           | 15.67          | 14.67          | 14.67            |
| 12  | Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)                              | Persen | 11.63           | 13.83          | 14.62          | 14.62            |

Sumber: Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2025-2026.

**B. Perjanjian dan Perjenjangan Kinerja Tahun 2025**

Dokumen Rencana Strategis dijabarkan secara operasional ke dalam Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang mengintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan prioritas. Renja tersebut menjadi fondasi utama dalam penetapan Perjanjian Kinerja (PK) sebagai instrumen monitoring dan evaluasi tahunan. Adapun rincian target kinerja tahunan yang menjadi komitmen dinas pada Tahun Anggaran 2025 tercantum di lampiran. Sedangkan perjenjangan kinerja dijabarkan pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2 Perjenjangan Kinerja Tahun 2025**

| Sasaran                                                                              | Outcome (Sasaran Program)                                      | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                                               | Indikator                                                                                                                | Satuan          | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      |                                                                |                                                                                                                  | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan                                                     | %               |                                                                                                                              |
|                                                                                      |                                                                |                                                                                                                  | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan                                                     | %               |                                                                                                                              |
| <b>Sasaran 1</b><br><b>Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman Layak Huni</b> |                                                                |                                                                                                                  | Persentase Pemenuhan Penyediaan Rumah Layak Huni dan Sarana Prasarana Perumahan Permukiman dalam Rangka Pencegahan Kumuh | %               |                                                                                                                              |
|                                                                                      | Meningkatnya ketersediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) |                                                                                                                  | Persentase panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara                                      | %               | <b>Program :<br/>Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU)</b>                                                  |
|                                                                                      |                                                                |                                                                                                                  | Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara                                           | %               |                                                                                                                              |
|                                                                                      |                                                                |                                                                                                                  | Persentase Luas Makam Siap Pakai yang di kelola Pemerintah                                                               | %               |                                                                                                                              |
|                                                                                      |                                                                | Tersedianya PSU di Perumahan                                                                                     | Jumlah Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang diintervensi                                                             | Paket Pekerjaan | <b>Kegiatan :<br/>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                                   |
|                                                                                      |                                                                | Terserahterimaknya PSU perumahan kepada Pemerintah Daerah                                                        | Presentase PSU Perumahan yang diserahkan terimakan ke Pemerintah Daerah                                                  | %               |                                                                                                                              |
|                                                                                      |                                                                | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                         | Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                      | Dokumen         | <b>Sub Kegiatan :<br/>Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan</b>                                                               |
|                                                                                      |                                                                | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan  | Laporan         | <b>Sub Kegiatan :<br/>Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</b> |

| Sasaran                                                  | Outcome (Sasaran Program)                       | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                                                            | Indikator                                                                                                                            | Satuan   | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                 | Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                                         | Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                    | Kelompok | <b>Sub Kegiatan :<br/>Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU</b>                                                    |
|                                                          |                                                 | Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan                                                        | Jumlah lokasi PSU Perumahan yang dilaksanakan perbaikan                                                                              | Lokasi   | <b>Sub Kegiatan :<br/>Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</b>                                                     |
|                                                          |                                                 | Terpenuhinya kebutuhan lahan pemakaman di Kota Bogor                                                                          | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum                                                         | Lokasi   | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan</b>                                                    |
|                                                          |                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                           |
| <b>Sasaran 2</b>                                         |                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                           |
| <b>Berkurangnya luasan kawasan kumuh kewenangan Kota</b> |                                                 |                                                                                                                               | Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kota                                                                                                   | Ha       |                                                                                                                                           |
|                                                          | Berkurangnya kawasan permukiman kumuh perkotaan |                                                                                                                               | Persentase Rumah Tidak Layak Huni di dalam kawasan kumuh kewenangan kota yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah                | %        | <b>Program :<br/>Kawasan Permukiman</b>                                                                                                   |
|                                                          |                                                 |                                                                                                                               | Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara                                      | %        |                                                                                                                                           |
|                                                          |                                                 |                                                                                                                               | Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara                                           | %        |                                                                                                                                           |
|                                                          |                                                 | Terlaksananya Rakor Kelompok Kerja/Forum PKP                                                                                  | Persentase pelaksanaan Rapat Koordinasi Kelompok Kerja/ Forum PKP                                                                    | %        | <b>Kegiatan :<br/>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>                                                     |
|                                                          |                                                 | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum | Laporan  | <b>Sub Kegiatan :<br/>Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum</b> |
|                                                          |                                                 | Tertata dan Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha                               | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditata dan ditingkatkan kualitasnya                                                 | Ha       | <b>Kegiatan :<br/>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                     |

| Sasaran                                                                                                                                                                                                                       | Outcome (Sasaran Program)                                                                                                                               | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                  | Indikator                                                                                                                                                                                     | Satuan              | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | Terbentuk dan terbinanya kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh            | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina                                                                                                                   | Kelompok Masyarakat | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh</b>          |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh            | Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                                                                               | Dokumen             | <b>Sub. Keg Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh</b>                               |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha | Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani                                                                                                                                    | Ha                  | <b>Kegiatan :<br/>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b> |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                      | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki                                                                                                                                                 | Unit Rumah          | <b>Sub Kegiatan :<br/>Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni</b>                                               |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh                     | Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi                                                                                                                                       | Dokumen             | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh</b>              |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                         | Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh                                 | Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar                                                                                                                                                            | Ha                  | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh</b>                                 |
| <b>Sasaran 3</b><br><br><b>Meningkatnya Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b> |                                                                                                                                                         |                                                                                     | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi warga terkena bencana dan relokasi program pemerintah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)<br><br>Persentase MBR yang menempati rusunawa | %                   |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                               | Meningkatnya Rumah Layak Huni (RLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat korban bencana dan terdampak relokasi program pemerintah |                                                                                     | Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni                                                                                                                         | %                   | <b>Program :<br/>Pengembangan Perumahan</b>                                                              |

| Sasaran | Outcome (Sasaran Program)              | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                                                                 | Indikator                                                                                                                      | Satuan  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) |                                                                                                                                    |                                                                                                                                |         |                                                                                                                                      |
|         |                                        |                                                                                                                                    | Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni            | %       |                                                                                                                                      |
|         |                                        |                                                                                                                                    | Persentase tingkat hunian rusunawa oleh MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah).                                                | %       |                                                                                                                                      |
|         |                                        | Terpenuhinya data rumah korban bencana yang akan direhabilitasi atau direlokasivv                                                  | Persentase pemenuhan penyediaan data rumah korban bencana yang akan direhabilitasi atau direlokasi                             | %       | <b>Kegiatan :<br/>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                |
|         |                                        | Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                         | Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                        | Dokumen | <b>Sub Kegiatan :<br/>Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</b>                                       |
|         |                                        | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                             | Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                              | Dokumen | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani</b>                            |
|         |                                        | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                                  | Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah                              | Dokumen | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana</b>                                                           |
|         |                                        | Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                                | Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus                                                 | Dokumen | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus</b>                                        |
|         |                                        | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                   | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                    | Dokumen | <b>Sub Kegiatan :<br/>Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                   |
|         |                                        | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi | Dokumen | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> |
|         |                                        | Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                               | Dokumen | <b>Sub Kegiatan :<br/>Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                              |

| Sasaran | Outcome (Sasaran Program) | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                           | Satuan                    | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                     |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                           | Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                                                    | Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi                                | Dokumen                   | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota</b>                            |
|         |                           | Terlibatnya warga korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota dalam persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | Persentase Peserta Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota  | %                         | <b>Kegiatan :<br/>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> |
|         |                           | Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                                                                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                              | Orang                     | <b>Sub Kegiatan :<br/>Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</b>                                  |
|         |                           | Terbangun atau terelokasinya rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota yang diintervensi oleh Pemerintah                                                    | Persentase rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang diintervensi Pembangunan dan Rehabilitasi oleh Pemerintah | %                         | <b>Kegiatan :<br/>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                          |
|         |                           | Terehabilitasinya rumah bagi korban bencana kabupaten/kota                                                                                                                  | Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi                                                                      | Unit Rumah                | <b>Sub Kegiatan :<br/>Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana</b>                                                                      |
|         |                           | Terbangunnya rumah khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                                                          | Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                                  | Unit Rumah                | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>           |
|         |                           | Meningkatnya jumlah hunian rumah susun                                                                                                                                      | Persentase tingkat hunian rumah susun (yang terisi)                                                                                 | %                         | <b>Kegiatan :<br/>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>                                                    |
|         |                           | Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun                                            | Laporan                   | <b>Sub Kegiatan :<br/>Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun</b>                                          |
|         |                           | Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                                                              | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                                                   | Dokumen                   | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>                                            |
|         |                           | Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota                                                                       | Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan         | Unit Bangunan Rumah Susun | <b>Sub Kegiatan :<br/>Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota</b>                      |

| Sasaran                                                                                                                           | Outcome (Sasaran Program)                                                                              | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                                    | Indikator                                                                                       | Satuan  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                       | Persentase Luas RTH Publik kawasan Budidaya                                                     | %       |                                                                                                              |
| <b>Sasaran 4</b><br><b>Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang</b> |                                                                                                        |                                                                                                       | Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Budidaya pada Kawasan Budidaya yang berkualitas      | %       |                                                                                                              |
|                                                                                                                                   | Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang |                                                                                                       | Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dibangun                                                  | Ha      | <b>Program :<br/>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>                                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                       | Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik                                      | Ha      |                                                                                                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                                        | Terbangunnya RTH Publik dan taman kehati lainnya                                                      | Luas RTH Publik dan taman kehati lainnya yang terbangun                                         | Ha      | <b>Kegiatan :<br/>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                       |
|                                                                                                                                   |                                                                                                        | Tersedianya RTH Publik dan taman kehati lainnya yang berkondisi baik                                  | Luas RTH Publik dan taman kehati lainnya yang berkondisi baik                                   | Ha      |                                                                                                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                                        | Tersedianya sarana prasarana penunjang pengelolaan RTHP dan taman kehati lainnya yang berkondisi baik | Persentase sarana prasarana penunjang pengelolaan RTHP dan taman kehati lainnya berkondisi baik | %       |                                                                                                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                       | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan RTHP dan Taman Kehati lainnya     | Orang   |                                                                                                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                                        | Tersusunnya Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                   | Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun                                    | Dokumen | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b>                 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                        | Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola                                                               | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Ha      | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</b>                                              |
|                                                                                                                                   |                                                                                                        | Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati      | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati             | Orang   | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</b> |

| Sasaran                                                                                                      | Outcome (Sasaran Program)                                                                                                            | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                                                                                                          | Indikator                                                                                                                                                              | Satuan           | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                                      | Terkelolanya Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola                                                                                                        | Unit             | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</b>                                |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      | Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola                                                                                                                           | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | Unit             | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya</b>                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                  |                                                                                                                 |
| <b>Sasaran 5</b><br><br><b>Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di lingkungan Perangkat Daerah</b> |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | Predikat SAKIP di Lingkungan Perangkat Daerah                                                                                                                          | Predikat         |                                                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itida                                                                                                                   | %                |                                                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Perangkat Daerah                                                                                                              | Indeks           |                                                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetaokan menjadi inovasi daerah dengan tingkat kematangan >100                                                                  | Inovasi/Tahun/PD |                                                                                                                 |
|                                                                                                              | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan Perangkat Daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan |                                                                                                                                                                             | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                                                                           | Nilai            | <b>Program :<br/>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>                                        |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Keuangan                                                                                                                                 | %                |                                                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)                                                                                                                           | Nilai            |                                                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                             | Jumlah Inovasi yang dibangun/dikembangkan                                                                                                                              | Inovasi          |                                                                                                                 |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      | Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pertanggungjawaban kinerja melalui pelaporan yang akuntabel                                                           | Persentase pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja dan pelaporan PD secara tepat waktu dan sesuai regulasi                          | %                | <b>Kegiatan :<br/>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                          |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | Dokumen          | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>                                       |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      | Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan          | <b>Sub Kegiatan :<br/>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</b> |
|                                                                                                              |                                                                                                                                      | Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan lingkup Perangkat Daerah                                                                             | Persentase pelaksanaan administrasi keuangan secara tepat waktu dan sesuai dengan regulasi                                                                             | %                | <b>Kegiatan :<br/>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                                    |

| Sasaran | Outcome (Sasaran Program) | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                                                                                    | Indikator                                                                                                                                          | Satuan      | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                       |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                           | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                    | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | Orang/Bulan | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>                                             |
|         |                           | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | Laporan     | <b>Sub Kegiatan :<br/>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</b>                   |
|         |                           | Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan     | <b>Sub Kegiatan :<br/>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</b> |
|         |                           | Meningkatnya efektifitas administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                    | Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                     | %           | <b>Kegiatan :<br/>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                         |
|         |                           | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                 | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                             | 3 paket     | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</b>                        |
|         |                           | Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan layanan dan kegiatan Perangkat Daerah melalui dukungan operasional yang memadai                              | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah                                                                                        | %           | <b>Kegiatan :<br/>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                |
|         |                           | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                                                     | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | Paket       | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>              |
|         |                           | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                                                         | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | Paket       | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>                                  |
|         |                           | Tersedianya Peralatan Rumah Tangga                                                                                                                    | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                | Paket       | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Peralatan Rumah Tangga</b>                                             |
|         |                           | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | Paket       | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>                                       |
|         |                           | Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                    | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | Laporan     | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>                          |

| Sasaran | Outcome (Sasaran Program) | Output (Sasaran Kegiatan dan Sasaran Sub Kegiatan)                                                                  | Indikator                                                                                              | Satuan  | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                             |
|---------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                           | Terwujudnya fasilitas pelayanan yang memadai untuk mendukung peningkatan kepuasan masyarakat                        | Persentase Pemenuhan Penyediaan BMD sesuai RKBMD                                                       | %       | <b>Kegiatan :<br/>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                        |
|         |                           | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | Unit    | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>                                                                 |
|         |                           | Tersedianya Mebel                                                                                                   | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan                                                                     | Paket   | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengadaan Mebel</b>                                                                                                     |
|         |                           | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Unit    | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                                                               |
|         |                           | Meningkatkan ketersediaan dan kualitas jasa penunjang operasional guna mendukung pelayanan publik                   | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Operasional Perangkat Daerah                             | %       | <b>Kegiatan :<br/>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                                    |
|         |                           | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | Unit    | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>                                                             |
|         |                           | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | Laporan | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>                                                                               |
|         |                           | Terlaksananya pemeliharaan Barang Milik Daerah di Lingkup Perangkat Daerah                                          | Persentase BMD Lingkup Perangkat Daerah yang berkondisi Baik                                           | %       | <b>Kegiatan :<br/>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                   |
|         |                           | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | Unit    | <b>Sub Kegiatan :<br/>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> |
|         |                           | Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                              | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | Unit    | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>                                                                            |
|         |                           | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | Unit    | <b>Sub Kegiatan :<br/>Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</b>                                                       |

C. Rencana Anggaran Tahun 2025

Berikut ini merupakan rencana alokasi anggaran yang didedikasikan untuk mendukung pencapaian target kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025, yang disusun berdasarkan prinsip penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*).

Tabel 2. 3 Rencana Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025

| No | No DPA            | Uraian                                                                                                              | PAGU ANGGARAN      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    | 1.04              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN                                                         | 175.568.179.782,00 |
|    | 1.04.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                         | 40.398.939.114,00  |
| 1  | 5-1.04.01.2.01    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                    | 22.780.800,00      |
|    | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                     | 4.139.200,00       |
|    | 1.04.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                               | 18.641.600,00      |
| 2  | 5-1.04.01.2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                              | 15.196.869.257,00  |
|    | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                   | 15.074.448.857,00  |
|    | 1.04.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                         | 737.200,00         |
|    | 1.04.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD                                     | 121.683.200,00     |
| 3  | 5-1.04.01.2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                           | 219.967.000,00     |
|    | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                                              | 219.967.000,00     |
| 4  | 5-1.04.01.2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | 406.881.978,00     |
|    | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | 5.774.300,00       |
|    | 1.04.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | 106.299.100,00     |
|    | 1.04.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                                                   | 28.999.100,00      |
|    | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                                                             | 39.912.400,00      |
|    | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | 225.897.078,00     |
| 5  | 5-1.04.01.2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | 1.533.600.500,00   |
|    | 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 1.013.756.600,00   |
|    | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 105.112.700,00     |
|    | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 414.731.200,00     |
| 6  | 5-1.04.01.2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | 18.441.632.096,00  |
|    | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1.169.141.260,00   |
|    | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 17.272.490.836,00  |
| 7  | 5-1.04.01.2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | 4.577.207.483,00   |
|    | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3.351.765.748,00   |
|    | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 141.118.380,00     |
|    | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 1.084.323.355,00   |
|    | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN                                                                                      | 7.080.840.258,00   |
| 8  | 5-1.04.02.2.01    | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota                     | 619.052.900,00     |
|    | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                | 85.879.100,00      |
|    | 1.04.02.2.01.0003 | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                     | 91.242.400,00      |

| No | No DPA            | Uraian                                                                                                     | PAGU ANGGARAN             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|    | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                           | 90.444.400,00             |
|    | 1.04.02.2.01.0007 | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                   | 85.879.100,00             |
|    | 1.04.02.2.01.0008 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | 89.284.400,00             |
|    | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                              | 85.879.100,00             |
|    | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                           | 90.444.400,00             |
| 9  | 5-1.04.02.2.03    | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>              | <b>923.556.000,00</b>     |
|    | 1.04.02.2.03.0011 | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota          | 923.556.000,00            |
| 10 | 5-1.04.02.2.05    | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>                                        | <b>5.538.231.358,00</b>   |
|    | 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun                                        | 45.650.458,00             |
|    | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                           | 5.492.580.900,00          |
|    | 1.04.03           | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                          | <b>31.626.248.604,00</b>  |
| 11 | 5-1.04.03.2.02    | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>     | <b>618.440.600,00</b>     |
|    | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                      | 53.228.800,00             |
|    | 1.04.03.2.02.0014 | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                                 | 565.211.800,00            |
| 12 | 5-1.04.03.2.03    | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>                  | <b>31.007.808.004,00</b>  |
|    | 1.04.03.2.03.0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                           | 24.414.175.139,00         |
|    | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                             | 6.593.632.865,00          |
|    | 1.04.05           | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                       | <b>96.462.151.806,00</b>  |
| 13 | 5-1.04.05.2.01    | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                                | <b>96.462.151.806,00</b>  |
|    | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                       | 130.278.400,00            |
|    | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian                 | 96.331.873.406,00         |
|    | 2.11              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                                         | <b>30.630.365.561,00</b>  |
|    | 2.11.04           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                                  | <b>30.630.365.561,00</b>  |
| 14 | 5-2.11.04.2.01    | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                                    | <b>30.630.365.561,00</b>  |
|    | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                         | 348.425.300,00            |
|    | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                                      | 8.232.616.052,00          |
|    | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                         | 83.924.829,00             |
|    | 2.11.04.2.01.0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                                     | 5.647.027.460,00          |
|    | 2.11.04.2.01.0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                                            | 16.318.371.920,00         |
|    | TOTAL             |                                                                                                            | <b>206.198.545.343,00</b> |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman, 2025.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang diselenggarakan oleh Pemerintah saat ini adalah perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dinas Perumahan dan Permukiman sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yang mengemban amanah Wali Kota dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar di sebagian Urusan Lingkungan Hidup, dan mempunyai tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan Permukiman yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis tahun 2025-2029 dan Rencana Kinerja tahun 2025 dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja. Sebagai landasan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan akuntabilitas kinerja memberi informasi tentang tingkat pencapaian target indikator dari masing-masing sasaran yang telah disepakati oleh Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor selaku penerima amanah dengan Wali Kota Bogor sebagai pemberi amanah sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja Perangkat Daerah diukur dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang ditetapkan dalam dokumen PK dengan realisasi. Pengukuran atas capaian kinerja tersebut, didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Angka maksimum capaian setiap indikator kinerja ditetapkan sebesar 100%. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih

dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0.

2. Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase capaian target indikator kinerja adalah :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, menggunakan rumus

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

atau :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Realisasi}) - \text{Realiasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
4. Predikat capaian kinerja mempergunakan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut: (lihat Tabel 3.1)

**Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

| No | Intervensi Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 91% ≤ 100%                         | Sangat Tinggi                        |
| 2  | 76% ≤ 90%                          | Tinggi                               |
| 3  | 66% ≤ 75%                          | Sedang                               |
| 4  | 51% ≤ 65%                          | Rendah                               |
| 5  | ≤ 50%                              | Sangat Rendah                        |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor pada Tahun 2025 diukur berdasarkan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terdapat 5 (lima) indikator kinerja telah yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebagai tolok ukur pencapaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor. Pada Tahun 2025, sebanyak 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target yang ditetapkan.

**Tabel 3. 2 Realisasi IKU Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025**

| Sasaran                                                                                                                        | Indikator Kinerja                                      | Satuan   | Target | Realisasi | Capaian (%) | Kriteria      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-------------|---------------|
| Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas, | Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah             | Predikat | A      | A         | 100,00      | Sangat Tinggi |
|                                                                                                                                | Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah | Indeks   | 3,85   | 3,85      | 100,00      | Sangat Tinggi |
| Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan permukiman                                                                  | Persentase Permukiman Layak Huni (KUMUH)               | %        | 90,26  | 91,32     | 101,20      | Sangat Tinggi |
|                                                                                                                                | Persentase Peningkatan Rumah layak Huni (RTLH)         | %        | 96,12  | 96,38     | 100,27      | Sangat Tinggi |
| Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas                                        | Persentase Luas RTH Publik Kawasan Budidaya            | %        | 4,26   | 4,416     | 103,66      | Sangat Tinggi |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, 2025.

Dari tabel di atas, berikut merupakan rincian pencapaian IKU Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor :

Tujuan RPD 1 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, efektif, dan efisien serta berorientasi pada pelayanan

Sasaran RPD 1 : Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif





Tujuan RPD 2 : Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran RPD 1 : Berkurangnya luasan kawasan kumuh kewenangan Kota



Tujuan RPD 2 : Terwujudnya Lingkungan Sehat Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran RPD 2 : Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Permukiman

Layak Huni



- Tujuan RPD 3 : Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas
- Sasaran RPD 1 : Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang



**A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman**

Berikut merupakan rincian beberapa capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman sepanjang Tahun 2025.

**1. Capaian Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Janji Politik)**

Dalam merealisasikan Janji Politik (Janpol) berupa perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2025, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor telah mengintervensi sejumlah RTLH yang dirinci pada tabel berikut.

**Tabel 3. 3 Capaian Janji Politik Perbaikan RTLH Tahun 2025**

| Rencana      |                       | Realisasi    |               |                       |               | Keterangan                                 |
|--------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Jumlah Unit  | Pagu                  | Jumlah Unit  | (%)           | Pagu                  | %             |                                            |
| 1.758        | 21.706.853.839        | 1.640        | 93,29%        | 20.211.815.000        | 93,11%        | Bantuan Sosial Terencana (BST) RTLH        |
| 488          | 8.508.493.000         | 483          | 98,98%        | 8.424.493.000         | 99,01%        | Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT) RTLH |
| <b>2.246</b> | <b>30.215.346.839</b> | <b>2.123</b> | <b>94,52%</b> | <b>28.636.308.000</b> | <b>94,77%</b> |                                            |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 123 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak terealisasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan validasi lapangan, kegagalan realisasi pada sejumlah unit disebabkan oleh faktor eksternal (objek bantuan), antara lain:

- a. Kemampuan Swadaya: Calon penerima manfaat telah melakukan perbaikan secara mandiri sebelum bantuan disalurkan.
- b. Duplikasi Bantuan: Objek diketahui telah menerima bantuan serupa dari sumber pendanaan lain (mencegah *double accounting*/ tumpang tindih bantuan).
- c. Perubahan Status Kepemilikan: Rumah/lahan telah terjual atau berpindah tangan, sehingga tidak lagi memenuhi kriteria subjektif penerima bantuan sesuai regulasi yang berlaku.

Beberapa *evidence* dari kegiatan perbaikan RTLH yang dilakukan oleh Disperumkim Kota Bogor akan ditampilkan pada halaman selanjutnya.

## BANSOS RTLH KOTA BOGOR T.A 2025

PHOTO BEFORE (09%)



PHOTO AFTER (100%)



NAMA PENERIMA BANSOS

KARDI

ALAMAT

KP.PASIR RT 004 RW 007 KELURAHAN KATULAMPA  
KECAMATAN BOGOR TIMUR

## BANSOS RTLH KOTA BOGOR T.A 2025

PHOTO BEFORE (DPR)



PHOTO AFTER (100%)



NAMA PENERIMA BANSOS

APRIYANTI

ALAMAT

LEMAH DUHUR RT 4 RW 1 Kelurahan MULYAHARJA  
Kecamatan BOGOR SELATAN

## BANSOS RTLH KOTA BOGOR T.A 2025

PHOTO BEFORE (DRI)



PHOTO AFTER (100%)



NAMA PENERIMA BANSOS

ACHMAD YANI

ALAMAT

KP SAWAH RT 001 RW 006 KELURAHAN KENCANA

## BANSOS RTLH KOTA BOGOR T.A 2025

PHOTO BEFORE (0%)



PHOTO AFTER (100%)



NAMA PENERIMA BANSOS

**HADIDJAH JD ABAS**

ALAMAT

JL.AYANI II GG.MESJID RT 003 RW 004 KELURAHAN  
TANAHSAREAL KECAMATAN TANAH SAREAL

## BANSOS RTLH KOTA BOGOR T.A 2025

PHOTO BEFORE (01%)



PHOTO AFTER (100%)



NAMA PENERIMA BANSOS

SRI FITRIANINGSIH

ALAMAT

BANTARJATI LEBAK RT 002 RW 001 KELURAHAN BANTARJATI  
KECAMATAN BOGOR UTARA

## BANSOS RTLH KOTA BOGOR T.A 2025

PHOTO BEFORE (0%)



PHOTO AFTER (100%)



NAMA PENERIMA BANSOS

ARSIH

ALAMAT

JL.BARU KUKUPU NO.35 RT 002 RW 008 KELURAHAN  
CIBADAK KECAMATAN TANAH SAREAL

### **Rekomendasi Tindak Lanjut**

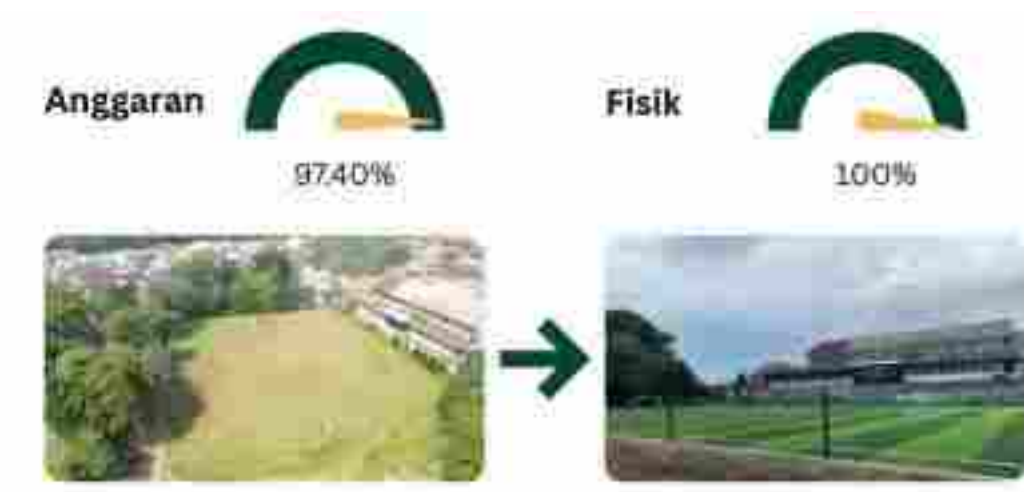
Untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode mendatang

(mencapai 100%), direkomendasikan untuk:

- a. Mempercepat proses validasi dan verifikasi data *By Name By Address* (BNBA) di awal tahun anggaran.
- b. Menyiapkan daftar cadangan (*waiting list*) penerima manfaat yang telah terverifikasi untuk memitigasi jika terdapat calon penerima yang gugur di tengah tahapan pelaksanaan.

2. Capaian Kegiatan Strategis

Kegiatan Strategis yang dilakukan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor di tahun 2025 adalah pembangunan Taman Lapangan Yasmin Sektor 6 dengan capaian sebagai berikut.



Gambar 3. 1 Pembangunan Lapangan Yasmin (Sektor 6)

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, 2025.

Berdasarkan data realisasi tahun 2025, berikut merupakan capaian kegiatan strategis Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor.

Tabel 3. 4 Capaian Kegiatan Strategis Tahun 2025

| PAKET STRATEGIS                              | RENCANA ANGGARAN | REALISASI     |         |       |
|----------------------------------------------|------------------|---------------|---------|-------|
|                                              |                  | ANGGARAN      |         | FISIK |
| Pembangunan Taman Lapangan Yasmin (Sektor 6) | 1.786.209.800    | 1.739.765.020 | 97.40 % | 100 % |
| TOTAL                                        | 1.786.209.800    | 1.739.765.020 | 97.40 % | 100 % |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, 2025.

Berdasarkan tabel capaian kegiatan strategis, sektor pembangunan infrastruktur publik menunjukkan tingkat keberhasilan yang optimal:

- a. Pembangunan Taman Lapangan Yasmin (Sektor 6): Mencapai tingkat realisasi fisik 100% sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.

b. Efisiensi Anggaran: Dari rencana anggaran sebesarRp1.786.209.800, realisasi keuangan tercatat sebesarRp1.739.765.020 atau 97,40%. Hal ini merepresentasikan adanya efisiensi biaya sebesar 2,6% tanpa mengurangi kualitas output fisik yang dihasilkan.

3. Capaian Program Prioritas

Selain Capaian Janpol dan Kegiatan Strategis, berikut ini merupakan capaian program prioritas Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor tahun 2025 dengan Paket Prioritas sebagai berikut.



Gambar 3. 2 Paket Prioritas Disperumkim Tahun 2025

Rincian capaian dari paket prioritas tersebut dijelaskan pada table berikut,

Tabel 3. 5 Capaian Program Prioritas Tahun 2025

| No | PAKET PRIORITAS                                                  | RENCANA      |               | REALISASI |               |        | Ket.    |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------|
|    |                                                                  | Jumlah Paket | Pagu          | Fisik (%) | Pagu          | % Pagu |         |
| 1  | Perbaikan Jalan Pada Lokasi Kumuh                                | 25           | 2.908.225.663 |           | 2.899.921.605 |        | Selesai |
|    | Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh Kelurahan Cibogor   | 12           | 1.428.575.128 | 100%      | 1.424.796.930 | 99,74% |         |
|    | Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh Kelurahan Harjasari | 4            | 494.669.835   | 100%      | 492.806.044   | 99,62% |         |
|    | Perbaikan Jalan Lingkungan pada Lokasi Kumuh Kelurahan Cibuluh   | 9            | 984.980.700   | 100%      | 982.318.631   | 99,73% |         |
| 2  | Perbaikan Saluran/Drainase                                       | 26           | 3.086.231.402 | 100%      | 3.076.603.065 | 99,69% |         |

| No               | PAKET PRIORITAS                                                    | RENCANA      |                      | REALISASI   |                      |               | Ket.    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------|---------|
|                  |                                                                    | Jumlah Paket | Pagu                 | Fisik (%)   | Pagu                 | % Pagu        |         |
|                  | <b>Pada Lokasi Kumuh</b>                                           |              |                      |             |                      |               |         |
|                  | Perbaikan Saluran Lingkungan pada Lokasi Kumuh Kelurahan Cibogor   | 14           | 1.703.284.202        | 100%        | 1.698.002.085        | 99,69%        | Selesai |
|                  | Perbaikan Saluran Lingkungan pada Lokasi Kumuh Kelurahan Harjasari | 4            | 460.982.400          | 100%        | 459.338.837          | 99,64%        | Selesai |
|                  | Perbaikan Saluran Lingkungan pada Lokasi Kumuh Kelurahan Cibuluh   | 8            | 921.964.800          | 100%        | 919.262.143          | 99,71%        | Selesai |
| <b>Sub Total</b> |                                                                    | <b>51</b>    | <b>5.994.457.065</b> | <b>100%</b> | <b>5.976.524.670</b> | <b>99,70%</b> |         |
|                  | Pembangunan Taman Landbanking Gang Barjo                           | 1            | 471.110.300          | 100%        | 418.400.127          | 88,81%        | Selesai |
| <b>Sub Total</b> |                                                                    | <b>1</b>     | <b>471.110.300</b>   | <b>100%</b> | <b>418.400.127</b>   | <b>88,81%</b> |         |
| 1                | Revitalisasi Lapangan Mini Soccer Taman Manunggal                  | 1            | 1.600.000.000        | 100%        | 1.575.164.969        | 98,45%        | Selesai |
| <b>Sub Total</b> |                                                                    | <b>1</b>     | <b>1.600.000.000</b> | <b>100%</b> | <b>1.575.164.969</b> | <b>98,45%</b> |         |
| <b>TOTAL</b>     |                                                                    | <b>53</b>    | <b>7.594.457.065</b> | <b>100%</b> | <b>7.744.846.286</b> | <b>98,06%</b> |         |

Sumber: Data Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, 2025.

Berdasarkan Tabel Capaian Program Prioritas, secara fisik seluruh kegiatan mencapai 100%, sedangkan pada serapan anggaran terdapat efisiensi sebesar 1,94%.

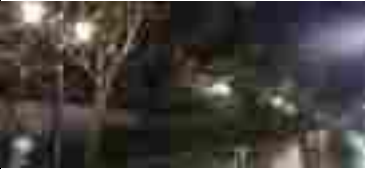
**4. Capaian Bidang Pengelolaan Taman dan Keanekaragaman Hayati**

Sepanjang tahun 2025 Bidang Pengelolaan Taman dan Keanekaragaman Hayati telah melakukan berbagai kegiatan yang dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 3. 6 Capaian Bidang Pengelolaan Taman dan Keanekaragaman Hayati Tahun 2025**

| NO.                                                             | PAKET KEGIATAN                              | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                    | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| <b>KEGIATAN PENGELOLAAN TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAINNYA</b> |                                             |                  |                            |                             |                                                                                     |             |                                                                                                                     |              |                              |
| 1                                                               | Peningkatan Kualitas Taman Jalur Hijau BORR | Rp600.000.000,00 | 1576,87                    | 2339,53                     |   | JALUR HIJAU | Jl. Sholeh Iskandar, RT.04/RW.05, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16166 - Lampu Merah Lotte Mart | BOGOR BARAT  | 6°33'21.1"S<br>106°46'43.5"E |
| 2                                                               | Revitalisasi Taman Peranginan               | Rp399.756.600,00 | 1086,00                    | 1347,67                     |  | TAMAN       | Jl. Jend. Sudirman No.31, RT.01/RW.04, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121                 | BOGOR TENGAH | 6°35'13.3"S<br>106°47'49.5"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                         | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                       | JENIS TAMAN                 | LOKASI PEKERJAAN                                                                                | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 3   | Peningkatan Kualitas Taman Tebing Sempur               | Rp399.754.200,00 | 1439,00                    | 728,54                      |    | TAMAN                       | Jl. Sempur No.1, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (Lapangan Sempur) | BOGOR TENGAH | 6°35'31.4"S<br>106°48'03.8"E |
| 4   | Peningkatan Kualitas Plaza Taman Sempur                | Rp399.754.200,00 | 1439,00                    | 889,35                      |    | TAMAN                       | Jl. Sempur No.1, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (Lapangan Sempur) | BOGOR TENGAH | 6°35'28.4"S<br>106°48'03.0"E |
| 5   | Peningkatan Kualitas Area Kuliner Sempur               | Rp399.754.200,00 | 1439,00                    | 397,37                      |   | TAMAN                       | Jl. Sempur No.1, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (Lapangan Sempur) | BOGOR TENGAH | 6°35'28.6"S<br>106°48'00.6"E |
| 6   | Revitalisasi Lampu dan Jaringan di Jl. Nyi Raja Permas | Rp196.960.800,00 | 24 UNIT                    | 24 UNIT                     |  | LAMPU DI KORIDOR AREA PLAZA | RT.04/RW.06, Cibogor, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat                            | BOGOR TENGAH | 6°35'44.7"S<br>106°47'27.2"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                       | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN                 | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                                        | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 7   | Revitalisasi Lampu dan Jaringan di Seputar Jalur SSA | Rp196.960.800,00 | 24 UNIT                    | 24 UNIT                     |   | LAMPU DI KORIDOR AREA PLAZA | Jl. Nasional 11, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122 - Jalan Pajajaran                         | BOGOR TENGAH | 6°35'57.3"S<br>106°48'17.1"E |
| 8   | Revitalisasi Hutan Kota Jl Beo - Jl Merak            | Rp399.801.600,00 | 1584,00                    | 2195,96                     |   | HUTAN KOTA                  | HUTAN Kota Ahmada Yani, RT.06/RW.04, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161                                      | TANAH SAREAL | 6°34'16.3"S<br>106°48'13.1"E |
| 9   | Revitalisasi Jalur Hijau Jl Ahmad Yani               | Rp354.015.900,00 | 1260,29                    | 757,67                      |   | JALUR HIJAU                 | Jl. Ahmad Yani 40-42, RT.01/RW.04, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161 - Area Median dan sebagian Jalur Hijau | TANAH SAREAL | 6°34'07.7"S<br>106°48'22.2"E |
| 10  | Peningkatan Kualitas Kebun Pembibitan Ciremai        | Rp399.754.200,00 | 1439,00                    | 136,50                      |  | BANGUNAN FASILITAS TAMAN    | Jl. Ceremei Ujung RW.02, Kecamatan Bogor Tengah Kota Bogor Jawa Barat                                                                   | BOGOR TENGAH | 6°35'04.9"S<br>106°47'59.5"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                             | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|--------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 11  | Penataan Ruang Publik Belakang SMKN 1      | Rp399.638.800,00 | 1012,00                    | 508,20                      |   | JALUR HIJAU | RT.06/RW.04, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161 -                                    | TANAH SAREAL | 6°34'11.5"S<br>106°48'10.0"E |
| 12  | Penataan Jalur Hijau Jl Kasintu            | Rp399.638.800,00 | 1012,00                    | 584,66                      |   | JALUR HIJAU | Jalur Hijaunya Saja - Area Taman Jl. Heulang, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161     | TANAH SAREAL | 6°34'10.6"S<br>106°48'09.9"E |
| 13  | Penataan Jalur Hijau Kecamatan Bogor Timur | Rp399.905.500,00 | 1051,00                    | 129,88                      |  | JALUR HIJAU | 9RH8+GMC Point Parking Lot, Jalan V, RT.03/RW.01, Sukasari, Bogor Timur, Bogor City, West Java 16142            | BOGOR TIMUR  | 6°37'16.2"S<br>106°48'59.9"E |
|     |                                            |                  |                            | 710,45                      | -                                                                                   | JALUR HIJAU | Jl. Raya Pajajaran No.6, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143 - Depan SMK Baranangsiang |              | 6°36'18.4"S<br>106°48'26.8"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                               | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN            | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                  | KECAMATAN     | KOORDINAT                    |
|-----|----------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 14  | Penataan Jalur Hijau Kecamatan Bogor Selatan | Rp399.905.500,00 | 1051,00                    | 1483,25                     |   | TAMAN PULO/POCKET PARK | Jl. Raya Batu Tulis RT 03 RW.07, Batutulis, Kec. Bogor Sel. Kota Bogor, Jawa Barat                                | BOGOR SELATAN | 6°37'32.7"S<br>106°48'36.0"E |
| 15  | Revitalisasi Taman Heulang                   | Rp399.754.200,00 | 1439,00                    | 588,19                      |   | TAMAN                  | CRJ2+4W7, Jl. Heulang, RT.06/RW.04, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16161 - Taman Heulang | TANAH SAREAL  | 6°34'09.3"S<br>106°48'10.1"E |
| 16  | Penataan Jalur Hijau Jl Sudirman             | Rp89.410.000,00  | 318,30                     | 334,22                      |  | JALUR HIJAU            | CQ7W+HRR, Jl. Jend. Sudirman, RT.07/RW.04, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat                 | BOGOR TENGAH  | 6°35'09.8"S<br>106°47'49.2"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                              | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN  | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                                                                    | KECAMATAN   | KOORDINAT                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 17  | Penataan Jalur Hijau Bubulak                                | Rp350.762.400,00 | 1248,71                    | 591,16                      |   | MEDIAN JALAN | Jl. Nasional 11, RT.04/RW.08, Bubulak, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16115 - Jalan Raya Dramaga                                                           | BOGOR BARAT | 6°34'09.9"S<br>106°45'14.6"E |
| 18  | Revitalisasi Taman Jalur Hijau Eks Tempat Pembuangan Sampah | Rp350.850.200,00 | 922,08                     | 143,76                      |   | JALUR HIJAU  | Jl. DR. Semeru - CQ7M+96M, RT.03/RW.01, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16111 (Eks TPS Semeru Sebelah Kiri Jalan Samping Pintu Masuk Golf Field)   | BOGOR BARAT | 6°35'11.3"S<br>106°46'59.1"E |
|     |                                                             |                  |                            | 481,09                      |  | JALUR HIJAU  | Jl. Tentara Pelajar - RW 11 Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat (Eks TPS sebelah kiri Jalan dari Jalan Merdeka Sebelum SPBU Tentara Pelajar) | BOGOR BARAT | 6°34'28.2"S<br>106°47'16.8"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                     | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                     | JENIS TAMAN | LOKASI PEKERJAAN                                                                                        | KECAMATAN   | KOORDINAT                    |
|-----|------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|
| 19  | Revitalisasi Taman Lapangan Kresna | Rp450.000.000,00 | 1222,49                    | 1431,00                     |  | TAMAN       | Jl. Kresna I, RT.04/RW.15, Bantarjati, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16153 - Lapangan Kresna | BOGOR UTARA | 6°34'26.2"S<br>106°48'40.1"E |
| 20  | Revitalisasi Taman Beringin        | Rp149.816.700,00 | 407,00                     | 736,91                      |  | TAMAN       | Jl. Gandaria II Blok G1 No.3, RT.02/RW.04, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152 | BOGOR UTARA | 6°34'22.8"S<br>106°49'02.4"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                    | PAGU               | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                       | JENIS TAMAN   | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                                            | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 21  | Revitalisasi Taman Durian Bantarkemang            | Rp149.734.900,00   | 523,00                     | 942,93                      |    | TAMAN         | 9RJ9+QRP, RT.05/RW.05, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143 - Taman Durian Bantar Kemang                            | BOGOR TIMUR  | 6°37'05.3"S<br>106°49'10.1"E |
| 22  | Revitalisasi Lapangan Mini Soccer Taman Manunggal | Rp1.600.000.000,00 | 3009,22                    | 3619,00                     |   | LAPANGAN      | Jalan Manunggal 2 RT.01/RW.15 Menteng Kecamatan Bogor Barat, Lapangan, bola Taman Manunggal, Kota Bogor, Jawa Barat 16111 - Taman Manunggal | BOGOR BARAT  | 6°34'57.1"S<br>106°47'13.8"E |
| 23  | Iluminasi Gedung TIC Alun-alun Kota Bogor         | Rp149.984.100,00   | 147 UNIT                   | 16 UNIT                     |  | ORNAMEN LAMPU | Jl. Kapten Muslihat No.17 A, RT.04/RW.06, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 - Alun - Alun Kota Bogor            | BOGOR TENGAH | 6°35'41.3"S<br>106°47'29.5"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                          | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN   | LOKASI PEKERJAAN                                                                 | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|---------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 24  | Pembangunan Taman Gerbang Perumahan Griya Tajur Indah I | Rp112.160.000,00 | 200,00                     | 19,50                       |   | DEKORASI KOTA | Jl. Muara Tegal                                                                  | BOGOR TIMUR  | 6°38'26.5"S<br>106°50'17.0"E |
| 25  | Pembangunan Taman Jalan Dadali                          | Rp132.000.000,00 | 600,00                     | 195,68                      |   | JALUR HIJAU   | Jl. Dadali RT 01, RW.05, Tanah Sareal, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat | TANAH SAREAL | 6°34'06.9"S<br>106°48'18.8"E |
| 26  | Pembangunan Taman Jalur Hijau Jl. Raya Cilebut          | Rp120.070.500,00 | 545,78                     | 251,66                      |  | JALUR HIJAU   | Jalur Hijau Jalan Raya Cilebut                                                   | TANAH SAREAL | 6°33'11.1"S<br>106°47'59.4"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                                                   | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                       | JENIS TAMAN     | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                                 | KECAMATAN     | KOORDINAT                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 27  | Revitalisasi Alun-Alun Kota Bogor                                                | Rp231.008.400,00 | 1069,48                    | 1069,48                     |    | FASILITAS TAMAN | Jl. Kapten Muslihat No.17 A, RT.04/RW.06, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 - Alun - Alun Kota Bogor | BOGOR TENGAH  | 6°35'41.3"S<br>106°47'29.5"E |
| 28  | Pembangunan Taman Hunian Ciranjang, kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Bogor Selatan | Rp199.616.400,00 | 672,00                     | 554,70                      |    | TAMAN           | 9R52+5Q7, RT.03/RW.03, Pamoyanan, Kec. Bogor Sel. Kota Bogor, Jawa Barat                                                         | BOGOR SELATAN | 6°38'31.6"S<br>106°48'06.9"E |
| 29  | Pembangunan Taman Landbanking Gang Barjo                                         | Rp471.110.300,00 | 575,86                     | 800,00                      |   | TAMAN           | RT 05 RW.01, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat                                                            | BOGOR TENGAH  | 6°35'36.9"S<br>106°47'08.4"E |
| 30  | Pembangunan Taman Jalur Hijau Jalan Siliwangi                                    | Rp199.762.500,00 | 525,00                     | 530,96                      |  | JALUR HIJAU     | Jalur Hijau Jalan Siliwangi sebelum Gereja Kristus                                                                               | BOGOR TIMUR   | 6°36'53.6"S<br>106°48'31.9"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                           | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                       | JENIS TAMAN | LOKASI PEKERJAAN                                                                                        | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 31  | Pembangunan Taman Jalur Hijau Jalan RE. Martadinata      | Rp120.120.000,00 | 546,00                     | 515,30                      |    | JALUR HIJAU | Dibawah Flyover Jl. Martadinata setelah rel kereta dari Air Mancur                                      | BOGOR TENGAH | 6°34'56.7"S<br>106°47'35.1"E |
| 32  | Pembangunan Taman Lingkungan Kecamatan Bogor Utara       | Rp110.000.920,00 | 196,15                     | 335,00                      |    | TAMAN       | Jl. Perumahan Taman Kenari RT 01 RW.10, Ciluar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat                | BOGOR UTARA  | 6°34'00.4"S<br>106°49'36.6"E |
| 33  | Pembangunan Taman Lingkungan Kel. Kedung Waringin        | Rp120.011.200,00 | 214,00                     | 806,68                      |   | TAMAN       | Jl. Cempaka RT 03 RW.14, Kedung Waringin, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat                     | TANAH SAREAL | 6°33'40.3"S<br>106°46'57.2"E |
| 34  | Pembangunan Taman Lingkungan RW. 01 Kelurahan Mekarwangi | Rp120.164.200,00 | 214,27                     | 484,31                      |  | TAMAN       | Jl. Pabuaran Cimanggis No.111, RT.01/RW.01, Mekarwangi, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16168 | TANAH SAREAL | 6°32'32.1"S<br>106°47'01.6"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                                                              | PAGU               | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                       | JENIS TAMAN | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                               | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 35  | Pembangunan Taman PSU Bukit Cimanggu City                                                   | Rp199.616.400,00   | 244,00                     | 1409,00                     |    | TAMAN       | Jl. Bukit Cimanggu City Raya RT 02 RW.11, Cibadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat                                   | TANAH SAREAL | 6°32'57.6"S<br>106°46'54.4"E |
| 36  | Pembangunan Taman Lapangan Yasmin (Sektor 6)                                                | Rp1.786.209.800,00 | 1822,29                    | 5586,00                     |    | TAMAN       | Jl. Pinang Raya Ruko Taman Yasmin Sektor VI No.Komplek, RT.06/RW.09, Curugmekar, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16113 | BOGOR BARAT  | 6°33'34.4"S<br>106°45'56.3"E |
| 37  | Pembangunan Taman Lingkungan Perumahan Ciluar Asri, kelurahan Ciluar, Kecamatan Bogor Utara | Rp200.000.000,00   | 244,47                     | 752,00                      |   | TAMAN       | Lapangan Ciluar Asri Jl. Gelatik IX No.c4, RT.07/RW.09, Ciluar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16156                 | BOGOR UTARA  | 6°33'42.6"S<br>106°49'31.3"E |
| 38  | Pembangunan Taman Lingkungan Perumahan Graha Grande, Kecamatan Tanah SareaL                 | Rp200.000.000,00   | 244,47                     | 1195,88                     |  | TAMAN       | Perumahan Graha Grande Blok B-C - RT 06 RW.07, Sukaresmi, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor Jawa Barat                             | TANAH SAREAL | 6°33'06.9"S<br>106°48'18.4"E |

| NO.                                                   | PAKET KEGIATAN                                                                                  | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                  | KECAMATAN     | KOORDINAT                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 39                                                    | Pembangunan Taman Lingkungan RT02 RW13 Taman Tirta Cimanggu, Kelurahan Mekarwangi, Tanah Sareal | Rp200.000.000,00 | 244,47                     | 516,19                      |   | TAMAN       | RT.02/RW.13, Mekarwangi, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16168                                          | TANAH SAREAL  | 6°31'52.3"S<br>106°46'43.0"E |
| <b>KEGIATAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)</b> |                                                                                                 |                  |                            |                             |                                                                                     |             |                                                                                                                   |               |                              |
| 1                                                     | Pengadaan Media Tanam Tanah Leuweung Batutulis                                                  | Rp61.450.000,00  | 151,06                     | 2687,99                     |   | JALUR HIJAU | Jl. Batu Tulis - Area Lereng Longsor                                                                              | BOGOR SELATAN | 6°37'30.7"S<br>106°48'33.4"E |
|                                                       | Pengadaan Media Pupuk Leuweung Batutulis                                                        | Rp38.550.000,00  |                            |                             |                                                                                     |             |                                                                                                                   |               |                              |
|                                                       | Pengadaan Tanaman Pengisi Leuweung Batutulis                                                    | Rp400.000.000,00 |                            |                             |                                                                                     |             |                                                                                                                   |               |                              |
| 2                                                     | Peningkatan Kualitas Taman Depan Terminal Baranangsiang                                         | Rp199.746.000,00 | 548,00                     | 1576,82                     |  | JALUR HIJAU | Jl. Nasional 11, RT.01/RW.03, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143 - Jalan Raya Pajajaran | BOGOR TIMUR   | 6°36'15.4"S<br>106°48'23.8"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                                                                                                                                                                | PAGU               | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN      | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                                             | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 3   | Peningkatan Kualitas Taman dan Dekorasi Taman Seputar Jalur SSA                                                                                                                               | Rp1.142.092.400,00 | 2652,33                    | 2652,33                     |   | JALUR HIJAU      | Jl. Jalak Harupat No.9, RT.05/RW.04, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122                                           | BOGOR TENGAH | 6°35'35.8"S<br>106°48'09.9"E |
| 4   | Pemeliharaan Taman-Taman Pulau Jalan Kota Bogor (Lawang Gintung PDAM, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Bubulak, Jalan Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Siliwangi dan Tugu Macan (Ciawi) | Rp199.999.921,00   | 464,47                     | 480,90                      |  | TAMAN PULO JALAN | Lawang Gintung PDAM, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Bubulak, Jalan Pajajaran, Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Siliwangi dan Tugu Macan (Ciawi) | BOGOR TIMUR  | 6°35'43.8"S<br>106°47'15.3"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                     | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN      | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                                 | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 5   | Penataan Taman Pulau Jalan BTM Jalan Ir. H. Juanda | Rp350.628.100,00 | 971,00                     | 610,80                      |   | TAMAN PULO JALAN | Jl. Ir. H. Juanda 66-11, RT.04/RW.02, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122                             | BOGOR TENGAH | 6°36'15.4"S<br>106°47'48.3"E |
| 6   | Penataan Taman Median Jalan Achmad Adnawijaya      | Rp396.126.700,00 | 1097,00                    | 1950,10                     |   | JALUR HIJAU      | Jl. Achmad Adnawijaya, 16152 CR78+3GJ Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat                                                       | BOGOR UTARA  | 6°35'14.2"S<br>106°48'58.6"E |
| 7   | Penataan Taman Jalur Hijau Warung Jambu            | Rp195.355.100,00 | 541,00                     | 49,20                       |   | JALUR HIJAU      | Taman Separator Warung Jambu                                                                                                     | BOGOR UTARA  | 6°34'07.3"S<br>106°48'29.8"E |
| 8   | Pemeliharaan Lapangan Rumput Alun-Alun             | Rp200.000.000,00 | 13333,33                   | 1768,36                     |  | LAPANGAN         | Jl. Kapten Muslihat No.17 A, RT.04/RW.06, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16121 - Alun - Alun Kota Bogor | BOGOR TENGAH | 6°35'42.5"S<br>106°47'29.4"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                                                                          | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN  | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                            | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 9   | Pemeliharaan Lapangan Rumput Taman Sempur                                                               | Rp200.000.000,00 | 13333,33                   | 6375,06                     |   | LAPANGAN     | Jl. Sempur No.1, Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 (Lapangan Sempur)                             | BOGOR TENGAH | 6°35'29.8"S<br>106°48'03.0"E |
| 10  | Pemeliharaan Rutin Taman Jalur Hijau Bogor Outer Ring Road (BORR) dan Taman Jalur Hijau Median Jagorawi | Rp200.000.000,00 | 11904,76                   | 11904,76                    |  | MEDIAN JALAN | Jl. Raya Bogor - Sukabumi No.8, RT.02/RW.04, Kp. Parung Jambu, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor, Jawa Barat 16143 | BOGOR TIMUR  | 6°36'32.7"S<br>106°48'38.6"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                                                   | PAGU             | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                      | JENIS TAMAN      | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                       | KECAMATAN     | KOORDINAT                    |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|
| 11  | Pemeliharaan Taman Jalur Hijau Jl. Lawang Gintung, Bogor Selatan | Rp199.998.931,00 | 597,19                     | 221,90                      |   | JALUR HIJAU      | Jl. Lawang Gintung 28, RT.06/RW.05, Batutulis, Kec. Bogor Sel., Kota Bogor, Jawa Barat 16133                           | BOGOR SELATAN | 6°37'14.9"S<br>106°48'44.6"E |
| 12  | Pemeliharaan Taman Palupuh                                       | Rp165.645.000,00 | 450,00                     | 450,00                      |   | TAMAN            | Taman P2KH - Taman Palupuh, Jl. Villa Citra Bantarjati 3, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16151 | BOGOR UTARA   | 6°34'34.9"S<br>106°48'50.5"E |
| 13  | Pemeliharaan Taman Pulau Jalan PGB                               | Rp100.311.600,00 | 179,00                     | 249,57                      |  | TAMAN PULO JALAN | Tugu Talas CQ5Q+235, RT.03/RW.04, Kb. Klp., Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat                             | BOGOR TENGAH  | 6°35'32.7"S<br>106°47'15.9"E |

| NO. | PAKET KEGIATAN                       | PAGU | LUAS DPA (M <sup>2</sup> ) | LUAS ASLI (M <sup>2</sup> ) | FOTO PEKERJAAN                                                                     | JENIS TAMAN | LOKASI PEKERJAAN                                                                                                                   | KECAMATAN    | KOORDINAT                    |
|-----|--------------------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| 14  | Taman Blumbak Depan MAN 1            | -    | -                          | 75,87                       |  | JALUR HIJAU | Komplek Bumi Meteng Asri Jl. Terapi Raya.11a, Parung Jambu RT No.02, RW.11, Menteng, Kec. Bogor Bar., Kota Bogor, Jawa Barat 16112 | BOGOR BARAT  | 6°34'37.3"S<br>106°46'55.9"E |
| 15  | Taman Jalur Hijau Jalan Mandalawangi | -    | -                          | 184,71                      |                                                                                    | TAMAN       | Jalan Mandalawangi, RW.04, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128                                           | BOGOR TENGAH | 6°35'27.5"S<br>106°48'14.0"E |

## 5. Capaian Inovasi

[illegible]

## 6. Capaian Penghargaan

| No | Nama Penghargaan / Penerima                                                                     | Kategori     | Pemberi Penghargaan / Penerima | Tempat / Waktu / Tanggal | Tempat / Waktu / Tanggal | Tempat / Waktu / Tanggal                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Widyaiswara 2013/14 (2013/2014) Penghargaan (Honor) sebagai Penghargaan Data Science Tahun 2013 | Best Data    | Indonesian Data Science        | 2013                     | 20 November 2013         | Penghargaan Data - Indonesia (Jakarta)         |
| 2  | Penghargaan 2 (Penghargaan) Best                                                                | Best Project | Indonesian Data Science        | 2013                     | 20 November 2013         | Penghargaan Best Project - Indonesia (Jakarta) |
| 3  | Penghargaan 2 (Penghargaan) Best                                                                | Best Project | Indonesian Data Science        | 2013                     | 20 November 2013         | Penghargaan Best Project - Indonesia (Jakarta) |
| 4  | Penghargaan 2 (Penghargaan) Best                                                                | Best Project | Indonesian Data Science        | 2013                     | 20 November 2013         | Penghargaan Best Project - Indonesia (Jakarta) |
| 5  | Penghargaan 2 (Penghargaan) Best                                                                | Best Project | Indonesian Data Science        | 2013                     | 20 November 2013         | Penghargaan Best Project - Indonesia (Jakarta) |
| 6  | Penghargaan 2 (Penghargaan) Best                                                                | Best Project | Indonesian Data Science        | 2013                     | 20 November 2013         | Penghargaan Best Project - Indonesia (Jakarta) |
| 7  | Penghargaan 2 (Penghargaan) Best                                                                | Best Project | Indonesian Data Science        | 2013                     | 20 November 2013         | Penghargaan Best Project - Indonesia (Jakarta) |
| 8  | Penghargaan 2 (Penghargaan) Best                                                                | Best Project | Indonesian Data Science        | 2013                     | 20 November 2013         | Penghargaan Best Project - Indonesia (Jakarta) |

## 7. Capaian Kemitran/CSR

[illegible]

8. Capaian Pendapatan 2025

Berikut merupakan capaian pendapatan dari Rumah Susun Menteng dan Cibuluh, serta penyewaan lapangan sepakbola yang dikelola oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor di tahun 2025. Capaian pendapatan ini turut berkontribusi pada PAD Kota Bogor.

Tabel 3. 7 Capaian Pendapatan 2025

| No | Bidang                                | Uraian                                                                                                               | Pagu Renja<br>Perubahan 2025<br>(Rp) | Realisasi (Rp)   | %       |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|---------|
| 1  | UPTD RUSUN                            | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan <b>UPTD Rumah Susun Cibuluh 2</b> Blok (Blok A,B) 107 Hunian                  | 587.600.000                          | 646.847.041,00   | 110,08% |
|    |                                       | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan <b>UPTD Rumah Susun Menteng</b> Asri 4 Blok (Blok A,B,C,D) 314 Hunian 10 Kios | 1.266.880.000                        | 1.421.447.071,00 | 112,20% |
|    |                                       | Jumlah                                                                                                               | 1.854.480.000                        | 2.068.294.112    | 111,53% |
| 2  | Pengelolaan Keanekaragam Hayati (PKH) | Lapangan sepakbola rumput sintetis di Lapangan Manunggal                                                             | 85.880.000                           | 109.810.000      | 127,86% |
|    |                                       | Jumlah                                                                                                               | 85.880.000                           | 109.810.000      | 127,86% |
|    |                                       | TOTAL                                                                                                                | 1.940.360.000                        | 2.178.104.112    | 112,25% |

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Permukiman, 2026.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa kontribusi pendapatan terbesar yaitu dari Rusun Menteng, disusul Rusun Cibuluh dan yang terakhir adalah penyewaan Lapangan Manunggal.

9. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah yang telah ditetapkan. Berikut ini merupakan hasil pencapaian IKU Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 yang ditampilkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3. 8 Capaian IKU Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025

| No | Indikator Kinerja Utama                                | Satuan   | 2024      | 2025   |           | Capaian Kinerja 2025 |
|----|--------------------------------------------------------|----------|-----------|--------|-----------|----------------------|
|    |                                                        |          | Realisasi | Target | Realisasi |                      |
| 1  | Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah             | Predikat | A         | A      | A (87.16) | 100,00               |
| 2  | Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah | Indeks   | 3,62      | 3,70   | 3,85      | 104,05               |
| 3  | Luas Kawasan Kumuh Kewenangan Kota                     | %        | N/A       | 90,96  | 91,32     | 100,40               |
| 4  | Persentase Peningkatan Rumah Layak Huni (RTLH) versi 1 | %        | 162       | 14     | 16,33     | 116,64               |

| No                | Indikator Kinerja Utama                     | Satuan | 2024      | 2025   |           | Capaian Kinerja 2025 |
|-------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|----------------------|
|                   |                                             |        | Realisasi | Target | Realisasi |                      |
| 5                 | Persentase Luas RTH Publik Kawasan Budidaya | %      | 4,26      | 4,26   | 4,416     | 103,66               |
| Rata-rata Capaian |                                             |        |           |        |           | 104,95               |

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Permukiman, 2026.

Berdasarkan tabel di atas dan jika mengacu pada tabel skala nilai perangkat kinerja, capaian kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025 lebih dari 100% atau memiliki kriteria baik sekali (BS).

**B. Realisasi Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025**

Berikut merupakan perbandingan pagu rencana anggaran an realisasi anggaran Disperumkim Tahun 2025.

**Tabel 3. 9 Capaian Realisasi Anggaran Disperumkim Tahun 2025**

| Pagu Indikatif 2025 (Rp) | Realisasi (Rp)  | Capaian (%) |
|--------------------------|-----------------|-------------|
| 206.198.545.343          | 200.829.609.994 | 97,40%      |

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Permukiman, 2026.

**C. Raport Kinerja**

Berikut ini merupakan rapor kinerja yang merangkum capaian kegiatan maupun serapan anggaran Disperumkim Kota Bogor.

**Tabel 3. 10 Raport Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025**

|                                            |                                    |                                         |                                             |
|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Capaian Kinerja Sasaran Sub Kegiatan 97,5% | Jumlah Sasaran Sub Kegiatan 40     | Jumlah yang Tercapai 39                 | Jumlah yang tidak Tercapai 1                |
| Efisiensi Anggaran 2,6%                    | Jumlah Anggaran Rp 206.198.545.343 | Jumlah yang Terserap Rp 200.829.609.994 | Jumlah yang tidak Terserap Rp 5.368.935.349 |

Sumber: Hasil Analisis Dinas Perumahan dan Permukiman, 2026.

Dari 40 rencana sub kegiatan, sebanyak 97,5% sub kegiatan telah terealisasi dengan baik di tahun 2025. Hanya terdapat 1 (satu) sub kegiatan yang tidak tercapai yaitu Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota pada Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Perumahan. Penyebab tidak tercapainya sub kegiatan tersebut adalah karena lokasi untuk relokasi perumahan tidak ditemukan.

**Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Dinas Perumahan dan Permukiman di Tahun 2025**

| No       | No DPA                | Uraian                                                                                | Pagu Anggaran             | Total                     | Persentase     |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|          | <b>1.04</b>           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>                    | <b>175.568.179.782,00</b> | <b>170.862.774.317,00</b> | <b>97,32%</b>  |
|          | <b>1.04.01</b>        | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                    | <b>40.398.939.114,00</b>  | <b>38.422.840.169,00</b>  | <b>95,11%</b>  |
| <b>1</b> | <b>5-1.04.01.2.01</b> | <b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>               | <b>22.780.800,00</b>      | <b>22.780.800,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|          | 1.04.01.2.01.0001     | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | 4.139.200,00              | 4.139.200,00              | 100,00%        |
|          | 1.04.01.2.01.0006     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18.641.600,00             | 18.641.600,00             | 100,00%        |
| <b>2</b> | <b>5-1.04.01.2.02</b> | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                         | <b>15.196.869.257,00</b>  | <b>14.313.922.753,00</b>  | <b>94,19%</b>  |
|          | 1.04.01.2.02.0001     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | 15.074.448.857,00         | 14.191.502.353,00         | 94,14%         |
|          | 1.04.01.2.02.0005     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | 737.200,00                | 737.200,00                | 100,00%        |
|          | 1.04.01.2.02.0007     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD       | 121.683.200,00            | 121.683.200,00            | 100,00%        |
| <b>3</b> | <b>5-1.04.01.2.05</b> | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                      | <b>219.967.000,00</b>     | <b>217.844.775,00</b>     | <b>99,04%</b>  |
|          | 1.04.01.2.05.0002     | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                | 219.967.000,00            | 217.844.775,00            | 99,04%         |
| <b>4</b> | <b>5-1.04.01.2.06</b> | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                             | <b>406.881.978,00</b>     | <b>405.723.710,00</b>     | <b>99,72%</b>  |
|          | 1.04.01.2.06.0001     | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                      | 5.774.300,00              | 5.735.500,00              | 99,33%         |
|          | 1.04.01.2.06.0002     | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | 106.299.100,00            | 106.230.500,00            | 99,94%         |
|          | 1.04.01.2.06.0003     | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | 28.999.100,00             | 28.973.000,00             | 99,91%         |
|          | 1.04.01.2.06.0005     | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                               | 39.912.400,00             | 39.854.300,00             | 99,85%         |
|          | 1.04.01.2.06.0009     | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                  | 225.897.078,00            | 224.930.410,00            | 99,57%         |
| <b>5</b> | <b>5-1.04.01.2.07</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>               | <b>1.533.600.500,00</b>   | <b>1.335.181.499,00</b>   | <b>87,06%</b>  |

| No       | No DPA                | Uraian                                                                                                              | Pagu Anggaran            | Total                    | Persentase    |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|          | 1.04.01.2.07.0002     | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | 1.013.756.600,00         | 819.000.000,00           | 80,79%        |
|          | 1.04.01.2.07.0005     | Pengadaan Mebel                                                                                                     | 105.112.700,00           | 104.700.000,00           | 99,61%        |
|          | 1.04.01.2.07.0006     | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | 414.731.200,00           | 411.481.499,00           | 99,22%        |
| <b>6</b> | <b>5-1.04.01.2.08</b> | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                         | <b>18.441.632.096,00</b> | <b>18.052.538.458,00</b> | <b>97,89%</b> |
|          | 1.04.01.2.08.0002     | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | 1.169.141.260,00         | 931.087.062,00           | 79,64%        |
|          | 1.04.01.2.08.0004     | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | 17.272.490.836,00        | 17.121.451.396,00        | 99,13%        |
| <b>7</b> | <b>5-1.04.01.2.09</b> | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                        | <b>4.577.207.483,00</b>  | <b>4.074.848.174,00</b>  | <b>89,02%</b> |
|          | 1.04.01.2.09.0001     | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 3.351.765.748,00         | 2.866.948.272,00         | 85,54%        |
|          | 1.04.01.2.09.0006     | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | 141.118.380,00           | 140.531.500,00           | 99,58%        |
|          | 1.04.01.2.09.0009     | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | 1.084.323.355,00         | 1.067.368.402,00         | 98,44%        |
|          | <b>1.04.02</b>        | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                                                                               | <b>7.080.840.258,00</b>  | <b>6.929.724.118,00</b>  | <b>97,87%</b> |
| <b>8</b> | <b>5-1.04.02.2.01</b> | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>              | <b>619.052.900,00</b>    | <b>528.515.700,00</b>    | <b>85,37%</b> |
|          | 1.04.02.2.01.0002     | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                | 85.879.100,00            | 85.575.500,00            | 99,65%        |
|          | 1.04.02.2.01.0003     | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani                                     | 91.242.400,00            | 91.092.200,00            | 99,84%        |
|          | 1.04.02.2.01.0004     | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                    | 90.444.400,00            | 90.259.700,00            | 99,80%        |
|          | 1.04.02.2.01.0007     | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                            | 85.879.100,00            | 85.753.100,00            | 99,85%        |
|          | 1.04.02.2.01.0008     | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota          | 89.284.400,00            | Lokasi tidak ditemukan   |               |

| No        | No DPA                | Uraian                                                                                                 | Pagu Anggaran            | Total                    | Persentase    |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
|           | 1.04.02.2.01.0009     | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                          | 85.879.100,00            | 85.520.000,00            | 99,58%        |
|           | 1.04.02.2.01.0010     | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                       | 90.444.400,00            | 90.315.200,00            | 99,86%        |
| <b>9</b>  | <b>5-1.04.02.2.03</b> | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>          | <b>923.556.000,00</b>    | <b>919.855.626,00</b>    | <b>99,60%</b> |
|           | 1.04.02.2.03.0011     | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota      | 923.556.000,00           | 919.855.626,00           | 99,60%        |
| <b>10</b> | <b>5-1.04.02.2.05</b> | <b>Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</b>                                    | <b>5.538.231.358,00</b>  | <b>5.481.352.792,00</b>  | <b>98,97%</b> |
|           | 1.04.02.2.05.0001     | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun                                    | 45.650.458,00            | 45.650.458,00            | 100,00%       |
|           | 1.04.02.2.05.0002     | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus                                       | 5.492.580.900,00         | 5.435.702.334,00         | 98,96%        |
|           | <b>1.04.03</b>        | <b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>                                                                      | <b>31.626.248.604,00</b> | <b>30.012.343.661,00</b> | <b>94,90%</b> |
| <b>11</b> | <b>5-1.04.03.2.02</b> | <b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b> | <b>618.440.600,00</b>    | <b>617.278.700,00</b>    | <b>99,81%</b> |
|           | 1.04.03.2.02.0012     | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                  | 53.228.800,00            | 52.703.800,00            | 99,01%        |
|           | 1.04.03.2.02.0014     | Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                             | 565.211.800,00           | 564.574.900,00           | 99,89%        |
| <b>12</b> | <b>5-1.04.03.2.03</b> | <b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>              | <b>31.007.808.004,00</b> | <b>29.395.064.961,00</b> | <b>94,80%</b> |
|           | 1.04.03.2.03.0002     | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                       | 24.414.175.139,00        | 22.821.690.470,00        | 93,48%        |
|           | 1.04.03.2.03.0013     | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                         | 6.593.632.865,00         | 6.573.374.491,00         | 99,69%        |
|           | <b>1.04.05</b>        | <b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>                                   | <b>96.462.151.806,00</b> | <b>95.497.866.369,00</b> | <b>99,00%</b> |
| <b>13</b> | <b>5-1.04.05.2.01</b> | <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                            | <b>96.462.151.806,00</b> | 95.497.866.369,00        | 99,00%        |
|           | 1.04.05.2.01.0001     | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                   | 130.278.400,00           | 96.687.600,00            | 74,22%        |

| No        | No DPA                | Uraian                                                                                     | Pagu Anggaran             | Total                     | Persentase    |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
|           | 1.04.05.2.01.0002     | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 96.331.873.406,00         | 95.401.178.769,00         | 99,03%        |
|           | 1.04.05.2.01.0006     | Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                               | 0                         | Rasionalisasi             |               |
|           | <b>2.11</b>           | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                         | <b>30.630.365.561,00</b>  | <b>29.966.835.677,00</b>  | <b>97,83%</b> |
|           | <b>2.11.04</b>        | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                                  | <b>30.630.365.561,00</b>  | <b>29.966.835.677,00</b>  | <b>97,83%</b> |
| <b>14</b> | <b>5-2.11.04.2.01</b> | <b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                                    | <b>30.630.365.561,00</b>  | 29.966.835.677,00         | 97,83%        |
|           | 2.11.04.2.01.0001     | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                         | 348.425.300,00            | 346.562.980,00            | 99,47%        |
|           | 2.11.04.2.01.0004     | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                                      | 8.232.616.052,00          | 7.926.427.918,00          | 96,28%        |
|           | 2.11.04.2.01.0006     | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati         | 83.924.829,00             | 81.872.000,00             | 97,55%        |
|           | 2.11.04.2.01.0007     | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                                     | 5.647.027.460,00          | 5.561.521.384,00          | 98,49%        |
|           | 2.11.04.2.01.0008     | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya                                            | 16.318.371.920,00         | 16.050.451.395,00         | 98,36%        |
|           | <b>T O T A L</b>      |                                                                                            | <b>206.198.545.343,00</b> | <b>200.829.609.994,00</b> | <b>97,40%</b> |

## BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2025, Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2025 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja dan ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman tahun 2025, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti dengan dokumen Rencana Kerja Perubahan tahun 2024.

Dalam pencapaian tersebut tentu tidak terlepas dari kendala-kendala teknis yang dihadapi. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk menghadapi kendala tersebut dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak yang kompeten. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun penetapan kebijakan di tahun berikutnya.

Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman  
Kota Bogor



## **LAMPIRAN**

- A. Perjanjian Kinerja 2025
- B. Hasil Apip Inspektorat
- C. Evaluasi kinerja TW IV 2025
- D. LRA 2025

## A. Perjanjian Kinerja 2025



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. Hery Antasuri, S.T., M.Dev.Plg

Jabatan : Pj Wali Kota Bogor

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Pj. Wali Kota

Dr. Hery Antasuri, S.T., M.Dev.Plg

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perumahan dan  
Permukiman

Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690602 197303 3 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

**Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang  
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

| No | Sasaran                                                                                                                       | Indikator Kinerja                                      | Satuan   | Target |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1  | Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas | Predikat SAKIP di Lingkup Perangkat Daerah             | Predikat | A      |
|    |                                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkup Perangkat Daerah | Indeks   | 3,85   |
| 2  | Terwujudnya lingkungan sehat perumahan dan kawasan Permukiman                                                                 | Persentase Permukiman Layak Huni (KUMUH)               | %        | 90,24  |
|    |                                                                                                                               | Persentase Peningkatan Rumah layak Huni (RTLH)         | %        | 96,12  |
| 3  | Terwujudnya pemenuhan ketersediaan Ruang terbuka Hijau Publik Budidaya yang berkualitas                                       | Persentase Luas RTH Publik Kawasan Budidaya            | %        | 4,25   |

| Program                                                           | Anggaran           | Keterangan |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Program Pengembangan Perumahan                                 | Rp. 4.220.228.658  | APBD       |
| 2. Program Kawasan Permukiman                                     | Rp. 29.373.891.604 | APBD       |
| 3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Rp. 79.484.955.987 | APBD       |
| 4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota    | Rp. 41.983.760.497 | APBD       |
| 5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)             | Rp. 16.698.189.201 | APBD       |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Pj. Wali Kota

Pihak Pertama,  
Kepala Dinas Perumahan dan  
Permukiman

Dr. Hery Antasari, S.T., M.Dev.Plg

Rr. Junarti Estiningsih, S.E., M.M.

NIP. 196906021993032007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin Gunawan, S.T.

Jabatan : Pjt. Sekretaris

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA :

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Pjt. Sekretaris

Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690603-199303-2-007

Erwin Gunawan, S.T.  
NIP. 19750210 200604 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                                            | Indikator Kinerja                                                                                         | Satuan  | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 1  | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah                   | Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah                                                                   | Nilai   | 89,50  |
|    |                                                                                    | Kepatuhan Pengelolaan Keuangan                                                                            | %       | 100,00 |
|    |                                                                                    | Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/Itda                                                       | %       | 100,00 |
|    |                                                                                    | Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100) | Inovasi | 1,00   |
| 2  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah | Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Perangkat Daerah                                                       | %       | 95,35  |

| Kegiatan                                                                 | Anggaran           | Keterangan |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | Rp. 22.780.800     | APBD       |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | Rp. 15.715.752.237 | APBD       |
| 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                | Rp. 219.967.000    | APBD       |
| 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                             | Rp. 156.338.500    | APBD       |
| 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah                                    | Rp. 398.953.378    | APBD       |
| 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah    | Rp. 1.364.620.800  | APBD       |
| 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  | Rp. 19.422.696.486 | APBD       |
| 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 4.838.989.796  | APBD       |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

  
Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690602 199303 2 007

Pihak Pertama,  
Plt. Sekretaris

  
Erwin Gunawan, S.T.  
NIP. 19750210 200604 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwin Gunawan, S.T.

Jabatan : Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690602 199303 2 007

Pihak Pertama,  
Kabid Perumahan dan Kawasan  
Permukiman

Erwin Gunawan, S.T.  
NIP. 19750210 200604 1 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                | Indikator Kinerja                                                                                              | Satuan | Target |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Perumahan layak Huni (kesehatan) | Persentase Luas Kawasan Pencegahan Kumuh yang tertangani                                                       | %      | 54,13  |
| 2  | Meningkatnya Rumah Layak Huni (kemiskinan)             | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi warga miskin warga terkena bencana dan relokasi program pemerintah | %      | 100    |
| 3  | Berkurangnya luas kawasan kumuh                        | Persentase pengurangan Luas Kawasan kumuh yang tertangani                                                      | %      | 68,76  |

| Kegiatan    |                                                                                                                        | Anggaran               | Keterangan  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I.</b>   | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                 | <b>Rp. 621.212.900</b> | <b>APBD</b> |
| 1.          | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                   | Rp. 85.879.100         | APBD        |
| 2.          | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 2 Uraian Pokir                         | Rp. 91.242.400         | APBD        |
| 3.          | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                       | Rp. 90.444.400         | APBD        |
| 4.          | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                               | Rp. 85.879.100         | APBD        |
| 5.          | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota             | Rp. 91.444.400         | APBD        |
| 6.          | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                          | Rp. 85.879.100         | APBD        |
| 7.          | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                       | Rp. 90.444.400         | APBD        |
| <b>II.</b>  | <b>Sosialisasi dan Penyalpan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>Rp. 22.320.800</b>  | <b>APBD</b> |
| 8.          | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                                             | Rp. 22.320.800         | APBD        |
| <b>III.</b> | <b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                          | <b>Rp. 497.366.000</b> | <b>APBD</b> |
| 9.          | Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang                                                              | Rp. 497.366.000        | APBD        |

Terkena Relokasi Program  
Kabupaten/Kota.

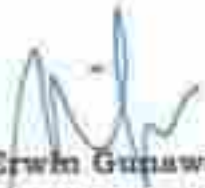
|                                                                                                           |            |                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| <b>IV. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>                                         | <b>Rp.</b> | <b>27.336.000</b>     | <b>APBD</b> |
| 10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                       | Rp.        | 27.336.000            | APBD        |
| <b>V. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b> | <b>Rp.</b> | <b>619.790.600</b>    | <b>APBD</b> |
| 11. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                 | Rp.        | 54.578.800            | APBD        |
| 12. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                            | Rp.        | 565.211.800           | APBD        |
| <b>VI. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>             | <b>Rp.</b> | <b>28.754.101.004</b> | <b>APBD</b> |
| 13. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                      | Rp.        | 22.160.468.139        | APBD        |
| 14. Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                        | Rp.        | 6.593.632.865         | APBD        |
| <b>VII. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                          | <b>Rp.</b> | <b>79.484.955.987</b> | <b>APBD</b> |
| 15. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                                  |            | 96.878.400            | APBD        |
| 16. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian            |            | 76.865.729.821        | APBD        |
| 17. Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                          |            | 22.069.600            | APBD        |
| 18. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan                                                                  |            | 79.484.955.987        | APBD        |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

  
**Rr. Junarti Estiningsih, S.E., M.M.**  
NIP. 19690603 199303 2 007

Pihak Pertama,  
Kabid Perumahan dan Kawasan  
Permukiman

  
**Erwin Gunawan, S.T.**  
NIP. 19750210 200604 1 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devi Librianti Juvita Permata, S.T., M.M.

Jabatan : Kabid Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai himpitan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

  
Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690603 199303 2 007

Pihak Pertama,  
Kabid Pengelolaan  
Keanekaragaman Hayati

  
Devi Librianti Juvita P, S.T., M.M.  
NIP.19761013 200501 2 009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                                                                | Indikator Kinerja                                                            | Satuan | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang | Persentase Luas Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya yang berkualitas | %      | 4,25   |

| Kegiatan                                                                              |            | Anggaran              | Keterangan  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| <b>1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>                            | <b>Rp.</b> | <b>16.698.189.201</b> | <b>APBD</b> |
| 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                 | Rp.        | 348.825.300           | APBD        |
| 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                              | Rp.        | 3.714.280.752         | APBD        |
| 3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Rp.        | 164.486.229           | APBD        |
| 4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati                             | Rp.        | 3.542.668.300         | APBD        |
| 5. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya 2 Usulan Pekar                     | Rp.        | 8.927.928.620         | APBD        |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Kepala Dinas**

Pihak Pertama,  
**Kabid Pengelolaan  
Keanekaragaman Hayati**

  
**Rr. Junarti Estiningsih, S.E., M.M.**  
NIP. 19690602 199303 2 007

  
**Devi Librianti Juvita P, S.T., M.M.**  
NIP.19761015 200501 2 009



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ilham Gunawan, S.E.  
Jabatan : Kepala UPTD Rumah Susun

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM  
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kepala UPTD Rumah Susun

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690602 199303 2 007

Ilham Gunawan, S.E.  
NIP. 19771224 200604 1 011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                         | Indikator Kinerja                     | Satuan | Target |
|----|---------------------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya hunian rumah susun | Persentase tingkat hunian rumah susun | %      | 90     |

| Kegiatan                                                               | Rp. | Anggaran      | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|
| 1. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus        | Rp. | 3.051.992.958 | APBD       |
| 1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Rp. | 55.794.258    | APBD       |
| 2. Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus    | Rp. | 2.986.198.700 | APBD       |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Kepala Dinas**

Pihak Pertama,  
**Kepala UPTD Rumah Susun**

  
**Rr. Juniarti Estininguh, S.E., M.M.**  
NIP. 196906021993032007

  
**Ilham Ganiawan, S.E.**  
NIP. 197711242006041011



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kelik Supriadi, S.Kom

Jabatan : Kepala UPTD Pemakaman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Pertama,  
Kepala UPTD Pemakaman

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

  
Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM  
NIP. 19630328 199403 1 002

  
Kelik Supriadi, S.Kom  
NIP. 19811127 201001 1 008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                            | Indikator Kinerja                                 | Satuan | Target |
|----|------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terpenuhiya Layanan Pemakaman Umum | Presentase Pengelolaan Makam di kelola Pemerintah | %      | 21,03  |

| Kegiatan                                                                                      | Anggaran          | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp. 2.500.278.166 | APBD       |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Kepala Dinas**

Pihak Pertama,  
**Kepala UPTD Pemakaman**

  
  
**Rr. Jutiarti Estiningih, SE, MM**  
 NIP. 19630328 199403 1 002

  
**Kelik Supriadi, S.Kom**  
 NIP. 19811127 201001 1 008



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Reska Nurdianti, S.E., M.M.

Jabatan : Kasubag Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Erwin Gunawan, S.T.

Jabatan : Plt. Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Plt. Sekretaris

Pihak Pertama,  
Kasubag Perencanaan, Keuangan dan  
Pelaporan

  
Erwin Gunawan, S.T.  
NIP. 19750210 200604 1 009

  
Reska Nurdianti, S.E., M.M.  
NIP. 19860224 201001 2 014

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                          | Indikator Kinerja                                                                                      | Satuan | Target |
|----|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah | Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja                                                                  | Nilai  | 29,06  |
|    |                                                                  | Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja                                                         | Nilai  | 28,13  |
|    |                                                                  | Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja                                                          | Nilai  | 12,50  |
|    |                                                                  | Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal                                                          | Nilai  | 19,81  |
|    |                                                                  | Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah                 | %      | 100    |
|    |                                                                  | Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu | %      | 100    |
|    |                                                                  | Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan                                       | %      | 100    |
|    |                                                                  | Persentase Kepatuhan Anggaran                                                                          | %      | 100    |
|    |                                                                  | Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA                                                             | %      | 95     |
|    |                                                                  | Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               | %      | 100    |

| Sub Kegiatan |                                                                                       | Anggaran           | Keterangan |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1.           | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                      | Rp. 22.780.800     | APBD       |
| 1.           | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Rp. 4.139.200      | APBD       |
| 2.           | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 18.641.600     | APBD       |
| II.          | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Rp. 15.715.732.237 | APBD       |
| 3.           | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Rp. 15.593.331.837 | APBD       |

|    |                                                                                 |     |                |      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------|
| 4. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     | Rp. | 737.200        | APBD |
| 5. | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Rp. | 121.683.200    | APBD |
| 6. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |     | 15.715.752.337 | APBD |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Plt. Sekretaris**



**Erwin Gunawan, S.T.**  
NIP. 19750210 200604 1 009

Pihak Pertama,  
**Kasubag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**



**Reska Nurdianti, S.E.,M.M.**  
NIP. 19860224 201001 2 014



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mirna, S.P.

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Erwin Gunawan, S.T.

Jabatan : Plt. Sekretaris

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Plt. Sekretaris**

Pihak Pertama,  
**Kasubag Umum dan Kepegawaian**

**Erwin Gunawan, S.T.**  
NIP. 19750210 200604 1 009

**Mirna, S.P.**  
NIP. 19780508 200604 2 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                                            | Indikator Kinerja                                                                            | Satuan | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah | Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan sarana dan prasarana                                     | %      | 95,35  |
|    |                                                                                    | Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan kualitas SDM                                             | %      | 87,11  |
|    |                                                                                    | Rata-rata Nilai SKM aspek pemenuhan persyaratan, prosedur, waktu, tarif, dan standar layanan | %      | 89,30  |
|    |                                                                                    | Rata-rata Nilai SKM aspek penanganan Pengaduan                                               | %      | 88,38  |

| Sub Kegiatan                                                          | Anggaran                 | Keterangan  |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>I. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                   | <b>Rp. 219.967.000</b>   | <b>APBD</b> |
| 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya             | Rp. 219.967.000          | APBD        |
| <b>II. Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                         | <b>Rp. 398.953.378</b>   | <b>APBD</b> |
| 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   | Rp. 7.500.000            | APBD        |
| <b>III. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>              | <b>Rp. 118.793.000</b>   | <b>APBD</b> |
| 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                  | Rp. 32.065.800           | APBD        |
| 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | Rp. 50.326.100           | APBD        |
| 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | Rp. 190.328.478          | APBD        |
| 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 1.364.630.800        | APBD        |
| 7. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Rp. 1.013.756.600        | APBD        |
| <b>IV. Pengadaan Mebel</b>                                            | <b>Rp. 105.112.700</b>   | <b>APBD</b> |
| 8. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                              | Rp. 245.731.500          | APBD        |
| 9. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | Rp. 19.422.696.486       | APBD        |
| <b>V. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>     | <b>Rp. 1.424.311.950</b> | <b>APBD</b> |

|                                                                                                                                |            |                      |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------|
| 10. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                      | Rp.        | 17.998.384.536       | APBD        |
| 11. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                      | Rp.        | 4.838.989.796        | APBD        |
| <b>VI. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b> | <b>Rp.</b> | <b>4.351.780.748</b> | <b>APBD</b> |
| 12. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                                   | Rp.        | 144.884.893          | APBD        |
| 13. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                               | Rp.        | 342.324.155          | APBD        |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Plt. Sekretaris**

Pihak Pertama,  
**Kasubag Umum dan Kepegawaian**

  
**Erwin Gupawan, S.T.**  
NIP. 19750210 200604 1 009

  
**Mirna, S.P.**  
NIP. 19780508 200604 2 005



## **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rani Susanti, S.Sos.,M.AP

Jabatan : Kasubag Tata Usaha UPTD Pemakaman

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Kelik Supriadi, S.Kom

Jabatan : Kepala UPTD Pemakaman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Kepala UPTD Pemakaman**

**Kelik Supriadi, S.Kom**  
NIP. 19811127 201001 1 008

Pihak Pertama,  
**Kasubag Tata Usaha UPTD  
Pemakaman**

**Rani Susanti, S.Sos.,M.AP**  
NIP. 19830501 2010012 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                                    | Indikator Kinerja                                                                 | Satuan | Target |
|----|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terlaksananya kegiatan Administrasi laporan Keuangan pada UPTD Pemakaman   | Presentase Kegiatan Administrasi laporan Keuangan pada UPTD Pemakaman             | %      | 100    |
| 2  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Pemakaman | Presentase Kegiatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Pemakaman | %      | 3.85   |

| Kegiatan                                                                                      | Anggaran          | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Rp. 2.500.278.166 | APBD       |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Kepala UPTD Pemakaman**

Pihak Pertama,  
**Kasubag Tata Usaha UPTD Pemakaman**

  
**Kelik Supriadi, S.Kom**  
 NIP. 19811127 201001 1 008

  
**Rani Susanti, S.Sos., M.AP**  
 NIP. 19830501 2010012 0018



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Rozak

Jabatan : Kasubag Tata Usaha UPTD Rumah Susun

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ilham Gunawan, S.E

Jabatan : Kepala UPTD Rumah Susun

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala UPTD Rumah Susun

Ilham Gunawan, S.E.  
NIP. 19771224 200604 1 011

Pihak Pertama,  
Kasubag Tata Usaha UPTD Rumah  
Susun

Abdul Rozak  
NIP. 19670313 199103 1 007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                                | Indikator Kinerja                                                             | Satuan | Target |
|----|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Terlaksananya Kegiatan Administrasi Laporan Keuangan pada UPTD Rusun   | Presentase Kegiatan Administrasi laporan Keuangan pada UPTD Rusun             | %      | 100    |
| 2  | Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Rusun | Presentase Kegiatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik pada UPTD Rusun | %      | 3.85   |

| Kegiatan                                                               |     | Anggaran      | Keterangan |
|------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------|
| 1. Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus        | Rp. | 3.051.992.988 | APBD       |
| 1. Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun | Rp. | 85.794.258    | APBD       |
| 2. Pematansahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus    | Rp. | 2.986.198.700 | APBD       |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala UPTD Rumah Susun

Ilham Ghufrwan, S.E.  
NIP. 19771214 200604 1 011

Pihak Pertama,  
Kasubag Tata Usaha UPTD Rumah  
Susun

Abdul Rozak  
NIP. 19670313 199103 1 007



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmadani, S.T

Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690602 1993032 007

Pihak Pertama,  
Teknik Tata Bangunan dan  
Perumahan Ahli Muda

Rahmadani, S.T.  
NIP. 19790814 200604 2 004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                | Indikator Kinerja                                                                                             | Satuan | Target |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Perumahan layak Huni (kesehatan) | Persentase panjang jalan perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara                           | %      | 54,13  |
|    |                                                        | Persentase drainase perumahan permukiman yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara                                | %      | 54,13  |
|    |                                                        | Persentase luas tembok penahan tanah yang dibangun untuk pengamanan kawasan permukiman dan pencegahan bencana | %      | 100    |

| Kegiatan                                                                                      | Anggaran                  | Keterangan  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|
| I. <b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                | <b>Rp. 79.484.955.987</b> | <b>APBD</b> |
| 1. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | 76.865.729.821            | APBD        |
| 2. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi        | 76.865.729.821            | APBD        |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
**Kepala Dinas**

Pihak Pertama,  
**Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda**

  
**Rr. Jumiarti Estiningsih, S.E., M.M.**  
NIP. 19690602 199303 3 007

  
**Rahmadani, S.T.**  
NIP. 19790814 200604 2 004



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RR. Mutiara Adhi Sarasati, S.T

Jabatan : Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Pertama

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

  
Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690602 199303 2 007

Pihak Pertama,  
Teknik Penyehatan Lingkungan  
Ahli Pertama

  
RR. Mutiara Adhi Sarasati, S.T  
NIP. 19910828 201903 2 003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                         | Indikator Kinerja                                                                               | Satuan | Target |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Berkurangnya luas kawasan kumuh | Persentase panjang jalan di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara | %      | 39.79  |
|    |                                 | Persentase drainase di kawasan kumuh kewenangan kota yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara      | %      | 33.67  |

| Kegiatan                                                                                                  | Anggaran          | Keterangan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|
| <b>I. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b> | Rp. 619.790.600   | APBD       |
| 1. Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                                  | Rp. 54.578.800    | APBD       |
| 2. Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh                                             | Rp. 565.211.800   | APBD       |
| <b>II. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>             | Rp. 6.593.632.865 | APBD       |
| 3. Pelaksanaan Petrugaran Kawasan Permukiman Kumuh                                                        | Rp. 6.593.632.865 | APBD       |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

**Rr. Junarti Estiningsih, S.E., M.M.**  
NIP. 19690602 199303 2 007

Pihak Pertama,  
Teknik Penyehatan Lingkungan  
Ahli Pertama

**RR. Matlara Adhi Sarasati, S.T**  
NIP. 19910828 201903 2 003



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A

Jabatan : Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

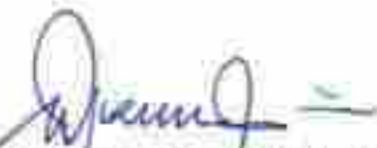
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Teknik Tata Bangunan dan  
Perumahan Ahli Muda

  
Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690602-199303-2-007

  
Deni Mohamad Ridwan, S.T.,M.A  
NIP. 19640708-200604-1-006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                    | Indikator Kinerja                                                                                                   | Satuan | Target |
|----|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1  | Meningkatnya Rumah Layak Huni (kemiskinan) | Persentase warga negara korban bencana yang menghuni rumah layak huni                                               | %      | 100    |
|    |                                            | Persentase warga negara yang terkena relokasi program pemerintah yang di fasilitasi untuk menghuni rumah layak huni | %      | 100    |
|    |                                            | Persentase intervensi rumah layak huni bagi warga miskin                                                            | %      | 14,73  |
| 2  | Berkurangnya luas kawasan kumuh            | Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang mendapat bantuan sosial perbaikan rumah                                      | %      | 5,53   |

| Kegiatan   |                                                                                                                        | Anggaran               | Keterangan  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|
| <b>I.</b>  | <b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>                 | <b>Rp. 621.212.900</b> | <b>APBD</b> |
| 1.         | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                                                   | Rp. 85.879.100         | APBD        |
| 2.         | Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani 2 Usulan Pokir                         | Rp. 91.242.400         | APBD        |
| 3.         | Pendataan Tinggost Kerusakan Rumah Akibat Bencana                                                                      | Rp. 90.444.400         | APBD        |
| 4.         | Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota                               | Rp. 85.879.100         | APBD        |
| 5.         | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota             | Rp. 91.444.400         | APBD        |
| 6.         | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                          | Rp. 85.879.100         | APBD        |
| 7.         | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota                                       | Rp. 90.444.400         | APBD        |
| <b>II.</b> | <b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b> | <b>Rp. 22.320.800</b>  | <b>APBD</b> |

|                                                                                                      |            |                       |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 8. Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan                        | Rp.        | 22.320.800            | APBD        |
| <b>III. Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>   | <b>Rp.</b> | <b>497.366.000</b>    | <b>APBD</b> |
| 9. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota | Rp.        | 497.366.000           | APBD        |
| <b>IV. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>                                    | <b>Rp.</b> | <b>27.336.000</b>     | <b>APBD</b> |
| 10. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                  | Rp.        | 27.336.000            | APBD        |
| <b>V. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>         | <b>Rp.</b> | <b>22.160.468.139</b> | <b>APBD</b> |
| 11. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni                                                                 | Rp.        | 22.160.468.139        | APBD        |
| <b>VI. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>                                                      | <b>Rp.</b> | <b>118.948.000</b>    | <b>APBD</b> |
| 12. Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan                                                             |            | 96.878.400            | APBD        |
| 13. Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU                                     |            | 22.069.600            | APBD        |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Teknik Tata Bangunan dan  
Perumahan Ahli Muda

  
Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690602 199303 2 007

  
Deni Mohamad Ridwan, S.T., M.A  
NIP. 19680708 200604 1 006



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bungbung Alam Krisnawan, S.T

Jabatan : Analis Kebijakan Ahli Muda

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Rr. Juniarti Estiningsih, SE, MM

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman

sebagai atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Analis Kebijakan Ahli Muda

  
Rr. Juniarti Estiningsih, S.E., M.M.  
NIP. 19690502-199303-2-007

  
Bungbung Alam Krisnawan, S.T.  
NIP. 19801203 201001 1 005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR**

| No | Sasaran                                                                                                | Indikator Kinerja                                          | Satuan | Target |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 1. | Meningkatnya ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Budidaya sesuai dengan rencana tata ruang | Luas penambahan RTH Publik Budidaya yang dibangun          | Ha     | 472,91 |
|    |                                                                                                        | Luas RTH Publik Kawasan Budidaya yang dikelola dengan baik | Ha     | 49,77  |

| Kegiatan                                                                               |     | Anggaran       | Keterangan |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------|
| 1. Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                   | Rp. | 16.698.189.201 | APBD       |
| 1. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati                 | Rp. | 348.825.300    | APBD       |
| 2. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)                                               | Rp. | 3.714.280.752  | APBD       |
| 3. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati | Rp. | 164.486.229    | APBD       |
| 4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati                             | Rp. | 3.542.668.300  | APBD       |
| 5. Pengelolaan Taman Keaneekaragaman Hayati Lainnya 2 Usulan Pokir                     | Rp. | 8.927.928.620  | APBD       |

Bogor, 02 Januari 2025

Pihak Kedua,  
Kepala Dinas

Pihak Pertama,  
Analisis Kebijakan Ahli Muda

  
**Rr. Juhlarti Estiningsih, S.E., M.M.**  
 NIP. 19690603 199303 2 007

  
**Bungbung Alam Krisnawan, S.T.**  
 NIP. 19801203 201001 1 005

## B. HASIL APIP INSPEKTORAT

### LAMPIRAN

|         |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nomor   | 700/ /XI-LHR/2025-Jtda                                                                                          |
| Tanggal | November 2025                                                                                                   |
| Perihal | Catatan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan dan Permukiman Tahun 2025-2029. |

### CATATAN HASIL REVIU RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KOTA BOGOR TAHUN 2025-2026

Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Kota Bogor Nomor 700/561-Jtda tanggal 28 Oktober 2025, perihal melaksanakan Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029, yang dilaksanakan mulai tanggal 29 Oktober 2025 sampai dengan 11 November 2025, kami sampaikan Catatan Hasil Reviu sebagai berikut:

#### 1. PENGUJIAN ATAS KELENGKAPAN DOKUMEN PENDUKUNG REVIU RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.

Hasil pengujian kelengkapan dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah **dipenuhi**, meliputi:

- Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah yang dikirim melalui Aplikasi Sipelari, tanggal 28 Oktober 2025;
- Peraturan Daerah tentang RPJMD 2025 -2029;
- Berita Acara Hasil Kesepakatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renstra; dan
- Dokumen lain yang diperlukan dalam pelaksanaan reviu.

#### 2. PENGUJIAN ATAS KETERHUBUNGAN DAN KESESUALAN PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH DALAM RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

Hasil pengujian atas Keterhubungan dan Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dengan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, didapatkan bahwa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor telah **terdapat keterhubungan dan kesesuaian** dengan Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Akhir Renstra Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025-2029 namun dalam Tabel 4.1 Rancangan Akhir Renstra belum mencantumkan Satuan atas target.

### 3. PENGUJIAN ATAS KETERHUBUNGAN DAN KESESESUAIAN KINERJA, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRA DENGAN IKU DAN IKK DAN BA HASIL KESEPAKATAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengujian atas Keterhubungan dan Kesesuaian Kinerja, Indikator dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra dengan IKU dan IKK serta BA Kesepakatan, dilakukan dengan membandingkan antara Rancir Renstra pada BAB III dan BAB IV dengan Berita Acara Kesepakatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Renstra Perangkat Daerah antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bogor.

Dari hasil pengujian didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Indikator dan Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah memiliki keterhubungan dan kesesuaian dengan IKU Perangkat Daerah dan BA Kesepakatan Perangkat Daerah namun dalam Tabel 3.1 dan BA Hasil Kesepakatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah **belum menyajikan Satuan** atas Target; dan
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah **terdapat keterhubungan dan kesesuaian** dengan IKK pada BA Hasil Kesepakatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

### 4. PENGUJIAN ATAS KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN ANTARA PROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DENGAN PROGRAM PRIORITAS DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RPJMD TAHUN 2025-2029 SERTA BA HASIL KESEPAKATAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH

Pengujian atas Konsistensi dan Keterhubungan antara Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rancir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029 serta BA Kesepakatan, dilakukan dengan membandingkan Program, Indikator, dan Target pada BAB IV Renstra dengan Program Prioritas pada Tabel 3.7 dan Program Perangkat Daerah Tabel 4.1 RPJMD Tahun 2025-2029 serta Berita Acara Kesepakatan Indikator Kinerja Penyusunan Renstra.

Dari hasil pengujian didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat catatan atas konsistensi dan keterhubungan antara Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:
  - a) Tabel 4.2 pada Rancangan Akhir Renstra belum mencantumkan Satuan atas Target;
  - b) Dalam Tabel 3.7 RPJMD terdapat 2 Indikator Kinerja atas Program "Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh" namun tidak ada

dalam Tabel 4.1 RPJMD dan Tabel 4.2 Rancangan Akhir Renstra. Indikator Kinerja Program tersebut adalah

- Indikator 'Persentase Rumah Tangga Yang Menempati Hunian Dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
  - Indikator 'Persentase Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)
- b. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah **terdapat keterhubungan dan kesesuaian** dengan BA Hasil Kesepakatan Indikator Kinerja Perangkat Daerah.

#### **5. PENGUJIAN ATAS KESESUAIAN ANTARA TARGET KINERJA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 DENGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2020-2024**

Hasil Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2020-2024 dilakukan dengan:

- a. membandingkan Realisasi Program Tahun 2024 pada BAB II dengan baseline pada BAB IV Rancbir Renstra Perangkat Daerah; dan
- b. melakukan pengujian atas kesesuaian target Program dengan Baseline pada BAB IV Rancbir Renstra Perangkat Daerah

Hasil Pengujian yaitu Target Kinerja Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 telah sesuai dengan Pengendalian dan Evaluasi Hasil Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah Periode 2020-2024, namun terdapat catatan yaitu Tabel 4.2 Rancangan Akhir Renstra **belum mencantumkan Satuan atas Target.**

#### **6. REKOMENDASI**

Berdasarkan Hasil Reviu Rancangan Akhir Renstra pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025-2029, terhadap kelemahan-kelemahan yang telah dikemukakan diatas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor untuk:

- a. Mencantumkan Satuan atas target pada Tabel 4.1, Tabel 3.1 dan Tabel 4.2 Rancangan Akhir Renstra Tahun 2025 – 2029; dan
- b. Memastikan kembali konsistensi dan keterhubungan antara Program pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan Program Prioritas dan Program Perangkat Daerah pada RPJMD Tahun 2025-2029, khususnya Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Demikian Catatan Hasil Reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) pada Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor Tahun 2025-2029, kami sampaikan sebagai bahan lebih lanjut.

Bogor, November 2025

Menyetujui,  
**KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN  
KOTA BOGOR**



**Ir. H. CHUSNUL ROZAQI, M.M.**  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 196711041994031010

**WAKIL  
PENANGGUNG JAWAB,**



**AYI SURYANING ATI, S.E.**  
Pembina Tingkat I - IV/b  
NIP. 197006161996122001

C. EVALUASI KINERJA TW IV TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Pagu Rp         | Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran s/d Tahun 2025 (%) |                |                         |              |
|----|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
|    |      |                                                                            |                 | Triwulan IV                                             |                |                         |              |
|    |      |                                                                            |                 | Fisik (%)                                               | Predikat Fisik | Realisasi Keuangan (Rp) | Keuangan (%) |
| 1  | 1.04 | Perumahan dan Pemukiman                                                    | 206,198,545,343 | 100                                                     |                | 200,829,609,994         | 97,40        |
|    |      | Dinas Perumahan                                                            | 206,198,545,343 | 100                                                     | ST             | 200,829,609,994         | 97,40        |
|    |      |                                                                            |                 |                                                         |                |                         | ST           |

Keterangan:  
Skala Nilai Predikat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | 91% s 100%                       | Sangat Tinggi                        |
| 2  | 76% s 90%                        | Tinggi                               |
| 3  | 66% s 75%                        | Sedang                               |
| 4  | 51% s 65%                        | Rendah                               |
| 5  | s 50%                            | Sangat Rendah                        |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN - BSSN. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QR Code dan pastikan dokumen ini sesuai dengan tanda dan tanggal pengisian.



GOVERNMENT OF WEST KALIMANTAN  
KEPADA DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

IB. AL. DINDINIA, MUHAMMAD NUR  
Pemerintah Kalimantan Barat



TAHUN ANGGARAN 2025  
PERIODE : 01 JANUARI 2025 S/D 31 DESEMBER 2025

Unit 10: The Great Wall

| No                                    | Uraian                                                       | Jumlah (Rp.)     |                  | Lalu / (Kurang) |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                       |                                                              | Pada Anggaran    | Realisasi        |                 |
|                                       |                                                              | 3                | 4                | 5 = 4 - 3       |
| <b>A</b>                              | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                     |                  |                  |                 |
| 6.1                                   | PENDAPATAN ASLI DAERAH(PAD)                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 144.830.389,00  |
| 6.1.02                                | Retribusi Daerah                                             | 1.040.300.000,00 | 2.148.020.000,00 | 208.070.000,00  |
| 6.1.02.03                             | Retribusi Jasa Mulus                                         | 1.040.300.000,00 | 2.148.020.000,00 | 208.070.000,00  |
| 6.1.02.03.17                          | Rumahnya Perikanan Tempat Perikanan, Perikanan, dan Outlying | 28.000.000,00    | 112.110.000,00   | 189,04          |
| 6.1.02.03.17.0001                     | Rumahnya Perikanan Tempat Perikanan, Perikanan, dan Outlying | 28.000.000,00    | 112.110.000,00   | 132,54          |
| 6.1.02.03.20                          | Retribusi Pemertarikan Asat Daerah                           | 1.854.480.000,00 | 2.037.100.000,00 | 119,85          |
| 6.1.02.03.20.0001                     | Retribusi Pemertarikan Asat Daerah                           | 1.854.480.000,00 | 2.037.100.000,00 | 103,60          |
| 6.1.04                                | Lain-lain PAD yang lain                                      | 3.100.000,00     | 20.171.000,00    | 1.201,81        |
| 6.1.04.01                             | Pemukatan Kurusi, Puktangan, atau Bembuk Lain                | 35.000,00        | 35.000,00        | 100,00          |
| 6.1.04.05.01                          | Pemukatan Kurusi, Puktangan, atau Bembuk Lain                | 35.000,00        | 35.000,00        | 100,00          |
| 6.1.04.06.01.0001                     | Pemukatan Kurusi, Puktangan, atau Bembuk Lain                | 35.000,00        | 35.000,00        | 100,00          |
| 6.1.04.13                             | Pemukatan Ganda Pemertarikan Daerah                          | 3.065.000,00     | 19.000.000,00    | 1.575,17        |
| 6.1.04.13.02                          | Pemukatan Ganda Pemertarikan Daerah                          | 3.065.000,00     | 19.000.000,00    | 1.575,17        |
| 6.1.04.13.02.0001                     | Pemukatan Ganda Pemertarikan Daerah                          | 3.065.000,00     | 19.000.000,00    | 1.575,17        |
| 6.1.04.13.02.0001.0001                | Pemukatan Ganda Pemertarikan Daerah                          | 3.065.000,00     | 19.000.000,00    | 1.575,17        |
| <b>B</b>                              | <b>SELANJA DAERAH</b>                                        |                  |                  |                 |
| 6.3                                   | SELANJA OPERASI                                              | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |
| 6.3.01                                | Selanjutnya                                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |
| 6.3.01.01                             | Selanjutnya                                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |
| 6.3.01.01.01                          | Selanjutnya                                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |
| 6.3.01.01.01.0001                     | Selanjutnya                                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |
| 6.3.01.01.01.0001.0001                | Selanjutnya                                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |
| 6.3.01.01.01.0001.0001.0001           | Selanjutnya                                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |
| 6.3.01.01.01.0001.0001.0001.0001      | Selanjutnya                                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |
| 6.3.01.01.01.0001.0001.0001.0001.0001 | Selanjutnya                                                  | 1.343.463.363,00 | 2.188.301.382,00 | 113,89          |

www.elsevier.com

| No                | Uraian                             | Jumlah (Rp.)   |                  | Lebih : (Kurang) |        |
|-------------------|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------|
|                   |                                    | Pagu Anggaran  | Realisasi        | (Rp.)            | %      |
| 1                 | 2                                  | 3              | 4                | 5 = 3 - 4        | 6      |
| 5.1.01.01.02.0001 | Biaya Tindakan Kurasi PPH          | 44.882.800,00  | 30.450.000,00    | 14.432.800,00    | 67,87  |
| 5.1.01.01.02.0002 | Biaya Tindakan Jaktan AHA          | 104.200.000,00 | 90.170.000,00    | 14.030.000,00    | 86,56  |
| 5.1.01.01.02.0003 | Biaya Tindakan Jaktan PMS          | 104.200.000,00 | 90.170.000,00    | 14.030.000,00    | 86,56  |
| 5.1.01.01.02.0004 | Biaya Tindakan Pengobatan AHA      | 80.800.000,00  | 47.110.000,00    | 33.690.000,00    | 58,31  |
| 5.1.01.01.02.0005 | Biaya Tindakan Pengobatan PPH      | 50.245.000,00  | 39.410.000,00    | 10.835.000,00    | 78,46  |
| 5.1.01.01.02.0006 | Biaya Tindakan Pengobatan PPH      | 10.400.000,00  | 7.700.000,00     | 2.700.000,00     | 73,84  |
| 5.1.01.01.02.0007 | Biaya Tindakan Pengobatan Umum AHA | 105.111.400,00 | 105.179.164,00   | 11.967.764,00    | 101,96 |
| 5.1.01.01.02.0008 | Biaya Tindakan Pengobatan Umum PPH | 170.800.700,00 | 170.420.000,00   | 380.000,00       | 99,74  |
| 5.1.01.01.02.0009 | Biaya Tindakan Pengobatan Umum PPH | 18.100.700,00  | 17.844.000,00    | 256.700,00       | 98,58  |
| 5.1.01.01.02.0010 | Biaya Tindakan Beras AHA           | 307.114.800,00 | 291.450.000,00   | 15.664.800,00    | 94,91  |
| 5.1.01.01.02.0011 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 220.050.400,00 | 207.800.100,00   | 12.250.300,00    | 94,43  |
| 5.1.01.01.02.0012 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 31.000.000,00  | 20.481.000,00    | 10.519.000,00    | 66,07  |
| 5.1.01.01.02.0013 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 700.207.000,00 | 640.302.051,00   | 59.904.949,00    | 91,45  |
| 5.1.01.01.02.0014 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 105.109.000,00 | 945.124.149,00   | 840.015.149,00   | 892,31 |
| 5.1.01.01.02.0015 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 11.100.000,00  | 2.157.100,00     | 8.942.900,00     | 19,34  |
| 5.1.01.01.02.0016 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 80.800,00      | 61.751,00        | 19.049,00        | 76,31  |
| 5.1.01.01.02.0017 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 70.000,00      | 52.400,00        | 17.600,00        | 74,86  |
| 5.1.01.01.02.0018 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 14.200,00      | 8.207,00         | 5.993,00         | 58,51  |
| 5.1.01.01.02.0019 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 403.004.000,00 | 407.203.791,00   | 4.199.791,00     | 100,30 |
| 5.1.01.01.02.0020 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 300.200.000,00 | 378.388.703,00   | 78.188.703,00    | 126,03 |
| 5.1.01.01.02.0021 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 31.001.000,00  | 59.007.000,00    | 28.006.000,00    | 190,34 |
| 5.1.01.01.02.0022 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 8.700.000,00   | 9.444.000,00     | 744.000,00       | 108,55 |
| 5.1.01.01.02.0023 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 8.004.000,00   | 8.300.000,00     | 296.000,00       | 103,68 |
| 5.1.01.01.02.0024 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 100.000,00     | 95.000,00        | 5.000,00         | 95,00  |
| 5.1.01.01.02.0025 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 20.200.000,00  | 20.400.000,00    | 200.000,00       | 101,00 |
| 5.1.01.01.02.0026 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 2.000.000,00   | 2.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0027 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 7.912.000,00   | 7.912.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0028 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 5.000.000,00   | 5.114.410.000,00 | 5.109.410.000,00 | 102,37 |
| 5.1.01.01.02.0029 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 5.000.000,00   | 4.000.000,00     | 1.000.000,00     | 80,00  |
| 5.1.01.01.02.0030 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 200.000,00     | 200.000,00       | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0031 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 700.000,00     | 700.000,00       | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0032 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 700.000,00     | 700.000,00       | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0033 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0034 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0035 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0036 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0037 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0038 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0039 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0040 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0041 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0042 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0043 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0044 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0045 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0046 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0047 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0048 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0049 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0050 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0051 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0052 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0053 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0054 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0055 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0056 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0057 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0058 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0059 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0060 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0061 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0062 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0063 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0064 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0065 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0066 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0067 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0068 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0069 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0070 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0071 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0072 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0073 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0074 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0075 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0076 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0077 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0078 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0079 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0080 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0081 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0082 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0083 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0084 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0085 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0086 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0087 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0088 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0089 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0090 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0091 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0092 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0093 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0094 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0095 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0096 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0097 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0098 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0099 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |
| 5.1.01.01.02.0100 | Biaya Tindakan Beras PPH           | 1.000.000,00   | 1.000.000,00     | 0,00             | 100,00 |









| No                | Uraian                                       | Jumlah (Rp.)         |                      | Laba / (Kurang)    |       |
|-------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------|
|                   |                                              | Pagar Anggaran       | Realisasi            | (Rp.)              | %     |
| 1                 | 2                                            | 3                    | 4                    | 5 = 4 x 2          | 6     |
| 5.2.04.02.01      | Belanja Modal Bangunan Air Bersih            | 103.075.000,00       | 811.350.899,00       | 110.825.014,00     | 98,83 |
| 5.2.04.02.01.0101 | Belanja Modal Bangunan Pengolahan Air Bersih | 300.400.000,00       | 301.000.000,00       | (600.545,00)       | 99,74 |
| 5.2.04.02.01.0201 | Belanja Modal Bangunan Air Bersih Lainnya    | 101.452.000,00       | 0,00                 | 111.725.400,00     | 99,01 |
| 5.2.04.04         | Belanja Modal Jaringan                       | 144.000.000,00       | 143.851.000,00       | 11.547.892,00      | 99,28 |
| 5.2.04.04.02      | Belanja Modal Jaringan Listrik               | 144.000.000,00       | 143.851.000,00       | 11.547.892,00      | 99,28 |
| 5.2.04.04.02.001  | Belanja Modal Jaringan Listrik               | 144.000.000,00       | 143.851.000,00       | 11.547.892,00      | 99,28 |
|                   | Jumlah Belanja Daerah                        | 308.198.540.342,00   | 300.329.811.004,00   | (5.308.833.349,00) | 97,49 |
|                   | BUMILUS / (DEKUR)                            | (204.353.864.360,00) | (196.841.300.832,00) | 5.012.833.749,00   | 97,30 |
|                   | Jumlah Lebih Pembiayaan Anggaran (Rp. PA)    | (204.353.864.360,00) | (196.841.300.832,00) | 5.012.833.749,00   | 97,30 |

Kota, 31 Desember 2016



